

**ANALISIS PENGARUH LANGSUNG DAN TIDAK  
LANGSUNG *PUBLIC SECTOR EXPENDITURE*  
TERHADAP KEMISKINAN MELALUI INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI  
SULAWESI TENGAH**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**AJENG MUKTI RAHARDIANTI**

**145020107111028**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG**

**2018**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**"Analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung *Public Sector Expenditure* Terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah."**

Yang disusun oleh :

Nama : Ajeng Mukti Rahardianti  
NIM : 145020107111028  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi  
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **26 Juni 2018** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA  
NIP. 197101111998021001  
(Dosen Pembimbing)
2. Prof. Dr. Maryunani, SE., MS  
NIP. 195503221981031002  
(Dosen Penguji I)
3. Putu Mahardika A.S.SE., M.Si., MA, Ph.D  
NIP. 197609102002121003  
(Dosen Penguji II)

Malang,  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan,

Dra. Marlina Ekawaty, M. Si., Ph.D.  
NIP. 196503111989032001



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Ajeng Mukti Rahardianti**  
 Tempat, tanggal lahir : **Jakarta, 4 Oktober 1995**  
 NIM : **145020107111028**  
 Jurusan : **S1 Ilmu Ekonomi**  
 Konsentrasi : **Perencanaan Pembangunan**  
 Alamat : **Jalan Bunga Merak I No. 11, Jatimulyo, Lowokwaru**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**Analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung *Public Sector Expenditure* terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing,



Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA  
NIP. 197101111998021001

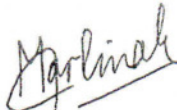
Malang,

Yang membuat pernyataan,



*Ajeng Mukti Rahardianti*  
NIM. 145020107111028

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan,



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.  
NIP. 196503111989032001



## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**Analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung *Public Sector Expenditure* terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah**

Yang disusun oleh :

Nama : Ajeng Mukti Rahardianti  
NIM : 145020107111028  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi  
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

Malang,  
Mengetahui,

Dosen Pembimbing,



Dra. Marlina Ekawaty, M. Si., Ph.D.  
NIP. 196503111989032001



Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA  
NIP. 197101111998021001



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Nama Lengkap** : Ajeng Mukti Rahardianti

**Jenis Kelamin** : Perempuan

**Tempat/Tanggal Lahir** : Jakarta, 4 Oktober 1995

**Agama** : Islam

**Alamat Email** : ajengmr@yahoo.com

**Pendidikan Formal**

Sekolah Dasar (2001-2007) : SD Cenderawasih II Jakarta

SMP (2007-2010) : SMP Negeri 11 Jakarta

SMA (2010-2013) : SMA Negeri 87 Jakarta

Perguruan Tinggi (2014-2018) : S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

**Pengalaman Organisasi**

2014 : Staff Magang Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi

2015 : Staff Tetap Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang dipersyaratkan untuk mendapatkan derajat Sarjana Ekonomi.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua dan segenap keluarga besar yang telah mendukung, memberikan semangat, motivasi, dan doa untuk kelancaran studi penulis. Terimakasih kepada para sahabat dan teman dekat penulis yang telah menjadi teman diskusi, selalu membantu dalam segala hal, selalu memberikan semangat, dan dukungan kepada penulis hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih kepada Bapak Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA yang telah membimbing dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman Ekonomi Pembangunan 2014 khususnya, teman-teman jurusan Ilmu Ekonomi yang saling memberikan semangat dan dukungan, secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Terakhir, penulis meminta doa dan dukungan kepada teman-teman untuk kelancaran dan kemudahan untuk kehidupan di masa depan penulis. Sekian.

## ABSTRAKSI

**Rahardianti, Ajeng Mukti. 2018. Analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Public Sector Expenditure Terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah. Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA**

Kemiskinan merupakan permasalahan umum di Negara-negara berkembang. Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan public. Pengeluaran sektor publik ini yang nantinya akan berperan untuk meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas masyarakat. Selanjutnya hal tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan akan menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung pengeluaran pemerintah sektor public terhadap kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode kuantitatif. Analisis data menggunakan analisis jalur, yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan kausal secara langsung maupun tidak langsung antara variabel terikat dan tidak terikat. Data time series menggunakan periode tahun 2012-2016 dan data cross section dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mampu menjadi variabel antara (intervening) yang menjelaskan pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu pengaruh tersebut memiliki hubungan negative, dimana ketika pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan sektor pendidikan mengalami peningkatan, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.

**Kata kunci:** *Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Public Sector Expenditure terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah". Penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk meraih derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Namun, berbagai kendala tersebut dapat diatasi berkat banyaknya bantuan dan dukungan yang tak terhingga dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas hidayah dan nikmat yang telah diberikan kepada penulis begitu besar yang tak terhingga.
2. Kedua orangtua, Bapak Bagus Kurniawan dan Ibu Rita Ambarwati, serta kakak-kakak penulis, Anugerah Sukma Perdana dan Marliah Ainun Nisa, beserta keluarga besar yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi hingga selesai.
3. Bapak Drs. Nurkholis, M.Buss., Ak., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.



4. Bapak Dr. rer. pol. Wildan Syafitri, SE., ME selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
5. Ibu Nurul Badriyah, SE., ME selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
6. Ibu Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
7. Bapak Dr. Moh. Khusaini, SE., M.Si., MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, saran, dan membantu dalam penyelesaian skripsi penulis.
8. Bapak Prof. Dr. Maryunani, SE., MS dan Bapak Putu Mahardika A.S.SE., M.Si., MA, Ph.D selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dalam penyempurnaan skripsi.
9. Best Supporters, Rizka Radita Putri, Asri Wijayanti, Safira Zata Amani, Fatmadina Alfia Izzata selaku sahabat seperjuangan dari awal hingga akhir perkuliahan yang selalu memberikan semangat dan selalu memberikan bantuan apapun, kalian terbaik.
10. M. Farhan Syahbuddin, M. Fazrir Rahman, Deiral Diandrino, Faris Albassam, Kevin Suputra, Renanda Afilia, Zaenur Rosyid yang terkadang meskipun menyebalkan tetapi selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi yang tiada henti untuk penulis.
11. Amelia Rubinta, Andi Ghina Senisa Putri Mappaseli Yunde, Andrea Ambiyu Hanan, Astrid Ramadanti, Dira Maulida, Mulky Belladina, Rana Alifianza, Raudhatul Azhar, Siska Kurnia Arum, Virginia Vionasafira sahabat-sahabat Forever MT yang selalu memotivasi penulis untuk segera kembali ke tanah kelahiran.

12. Tinovia Harlies Reynalda, Dyah Ratri Kusumaningtyas, Shabrina Handimarsya selaku teman diskusi yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan bahan diskusi yang menarik kepada penulis dan bantuan berupa materil.
13. Seluruh teman-teman Ekonomi Pembangunan 2014 yang saling memberikan semangat dari awal skripsi hingga selesai.
14. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi yang belum dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis adalah skripsi yang telah disusun bisa bermanfaat dalam pengembangan pendidikan di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk masa mendatang, khususnya seluruh civitas akademika. Penulis juga berharap skripsi ini juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, Juli 2018

Ajeng Mukti Rahardianti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	iv
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	v
<b>ABSTRAKSI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kerangka Teori .....	11
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	11
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik .....	14
2.1.3 Kemiskinan .....	21
2.2 Kerangka Pikir .....	31
2.3 Hipotesis.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	34
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian .....	34
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	37
3.5 Metode Analisis .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	46
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian .....	47
4.3 Hasil Analisis .....	54

4.4 Pembahasan .....	65
----------------------	----

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	75
5.2 Saran .....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tren Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.....	3
Tabel 1.2 Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Provinsi tahun 2012-2017 .....	6
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .....	36
Tabel 4.1 Kondisi Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah.....	47
Tabel 4.2 Rasio Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2016.....	47
Tabel 4.3 Rasio Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2016.....	49
Tabel 4.4 Rasio Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2016 .....	50
Tabel 4.5 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2016.....	51
Tabel 4.6 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2016.....	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov .....	55
Tabel 4.8 Hasil Regresi Variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y.....	56
Tabel 4.9 Hasil Regresi Variabel X1, X2, X3, dan Y terhadap Z.....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan IPM Indonesia dan Dunia .....	3
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan.....	25
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 3.1 Model Analisis Jalur/Path Analysis.....	40
Gambar 3.2 Substruktur 1 Model Analisis Jalur/Path Analysis.....	41
Gambar 3.3 Substruktur 2 Model Analisis Jalur/Path Analysis.....	41
Gambar 3.4 Substruktur 3 Model Analisis Jalur/Path Analysis.....	42
Gambar 4.1 Model Persamaan/Sub Struktur 1 Analisis Jalur.....	60
Gambar 4.2 Model Persamaan/Sub Struktur 2 Analisis Jalur.....	61
Gambar 4.3 Model Analisis Jalur .....	63
Gambar 4.4 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010 – 2014.....	68
Gambar 4.5 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011 – 2016 .....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan, dan Sektor Infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2016

Lampiran 2: Data IPM dan Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2016



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang menjadi tempat tinggal bagi masyarakat dengan jumlah yang besar pula. Dengan banyaknya pulau yang menyatukan negara kepulauan tersebut menjadi satu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibutuhkan peran Pemerintahan yang kuat agar suatu daerah dengan daerah lainnya dapat saling terintegrasi dan tidak terpecah belah. Bentuk dan upaya peran Pemerintah dalam menyatukan suatu negara dapat berupa banyak hal, salah satunya seperti program Pembangunan Nasional yang mendukung kemajuan kualitas generasi bangsa. Pembangunan ini dapat dikembangkan dari berbagai bidang kehidupan, diantaranya yaitu dari bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pelayanan masyarakat, dan bidang lain sebagainya. Untuk mewujudkan pembangunan dari berbagai bidang yang efektif dan efisien, Pemerintah membutuhkan biaya yang digunakan untuk menunjang proses pembangunan tersebut yang biasa disebut dengan Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik/Belanja Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, Belanja Pemerintah seringkali mengalami kendala untuk mencapai target yang efektif dan efisien dikarenakan oleh berbagai faktor dari luar maupun dari dalam Pemerintahan itu sendiri. Pemerintah seringkali mengalami ketidakharmonisan antara anggaran yang telah dirancang dengan realisasi anggaran. Besaran anggaran belanja Pemerintah dapat bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Disamping itu, realisasi dari belanja Pemerintah pada tahun bersangkutan terkadang tidak sesuai dengan anggaran yang telah tertera pada rancangan di awal tahun berjalan. Ketidaksesuaian nominal pada kedua indikator tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam

menemukan kesalahan apa yang tidak boleh diulang maupun kebijakan apa yang seharusnya dapat ditetapkan ditahun berikutnya. Pemerintah tentunya menginginkan kebijakan yang dapat menumbuhkan perekonomian Negara dan tidak merugikan masyarakat luas. Maka dari itu, dibutuhkan kemampuan perencanaan dan strategi yang baik dalam mensinergikan antara anggaran dengan realisasi belanja Pemerintah.

Tinggi rendahnya besaran realisasi belanja Pemerintah kurang lebihnya dapat mencerminkan pembangunan yang sedang dilaksanakan di wilayah tersebut. Pembangunan dari berbagai bidang yang dilakukan oleh Pemerintah tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kelayakan hidup masyarakatnya. Lembaga dunia yang bertanggung jawab untuk menentukan perhitungan terhadap kualitas dan kelayakan hidup masyarakat adalah United Nations Development Programme (UNDP). Sejak tahun 2010-2011, UNDP telah membentuk metode baru dan menyempurnakan metode lama dalam perhitungan kualitas dan kelayakan hidup yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam perhitungan IPM tersebut, terbagi dari tiga indikator utama yang diantaranya ialah kesehatan, pendidikan, dan standar hidup atau pendapatan perkapita masyarakat. Masyarakat tidak bisa semata-mata mencapai mencapai angka kesehatan, pendidikan dan pendapatan perkapita yang tinggi tanpa didukung dengan pembangunan dan pembaruan fasilitas-fasilitas penunjang yang memang disediakan untuk masyarakat itu sendiri. Maka dari itu dalam hal ini, Pemerintah berperan penting dalam penyediaan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan.

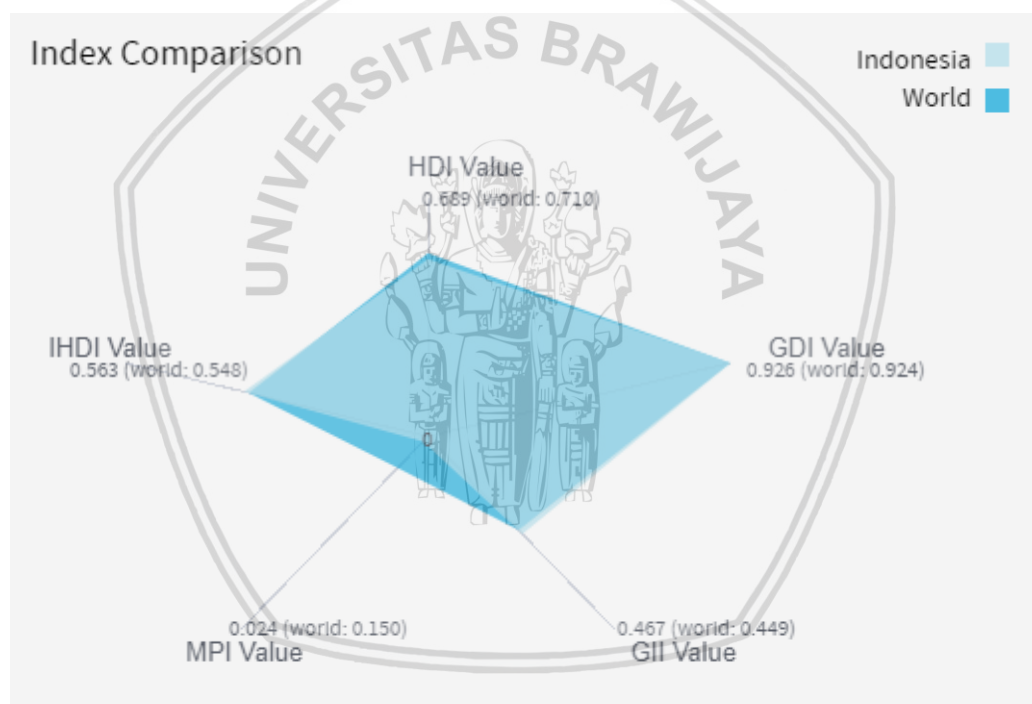
Berdasarkan data yang diperoleh dari UNDP, Indonesia memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia dengan taraf sedang. Hal ini dapat terlihat dari tabel dan gambar berikut.

**Tabel 1.1 Tren Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia**

	Life expectancy at birth	Expected years of schooling	Mean years of schooling	GNI per capita (2011 PPP\$)	HDI value
1990	63.3	10.1	3.3	4,270	0.528
1995	65.0	10.1	4.2	5,844	0.564
2000	66.3	10.6	6.7	5,243	0.604
2005	67.2	10.9	7.4	6,495	0.632
2010	68.1	12.3	7.4	8,234	0.662
2011	68.3	12.6	7.5	8,607	0.669
2012	68.5	12.9	7.6	9,017	0.677
2013	68.7	12.9	7.8	9,392	0.682
2014	68.9	12.9	7.9	9,703	0.686
2015	69.1	12.9	7.9	10,053	0.689

Sumber: Human Development Report UNDP 2016

**Gambar 1.1 Perbandingan IPM Indonesia dan Dunia**



Sumber: Human Development Report UNDP 2016

Indonesia memiliki tren IPM yang terus meningkat pada berbagai indikator di setiap tahunnya sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2015. Perbandingan angka IPM Indonesia pun tidak jauh berbeda dengan rata-rata angka IPM dunia yaitu sebesar 0,689 dan IPM dunia sebesar 0,710. Hal ini menunjukkan



Indonesia merupakan Negara dengan masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang cukup baik berdasarkan perhitungan IPM.

Menurut Nurkse dalam Kuncoro (2004), yang membahas teori tentang Lingkaran Setan Kemiskinan, adanya keterkaitan antara modal manusia dengan pendapatan mereka dan dapat berimplikasi terhadap tingkat kemiskinan suatu Negara. Nurkse berpendapat bahwa suatu Negara mengalami kemiskinan dikarenakan oleh produktivitas dari masyarakatnya yang rendah dan terjadinya kegagalan pasar. Dengan melihat data IPM Indonesia yang cukup tinggi mendekati rata-rata IPM dunia, maka jika dikaitkan dengan teori yang telah diungkapkan oleh Nurkse dengan mengabaikan variabel lain (*ceteris paribus*) Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang cukup rendah. Hal ini dapat terjadi oleh sebab hubungan yang terjalin memiliki sifat negative antara produktivitas dengan kemiskinan, dimana ketika tingginya produktivitas masyarakat di suatu wilayah tertentu, maka tingkat kemiskinan akan menurun atau sebaliknya.

Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami di negara-negara maju. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan sendiri. Untuk memahami masalah kemiskinan, perlu dipandang dari dua aspek, yakni kemiskinan sebagai suatu kondisi dan kemiskinan sebagai suatu proses. Sebagai suatu kondisi, kemiskinan adalah suatu fakta dimana seseorang atau sekelompok orang hidup dibawah atau lebih rendah dari kondisi hidup layak sebagai manusia disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan sebagai suatu proses, kemiskinan merupakan proses menurunnya daya dukung terhadap hidup seseorang atau sekelompok orang

sehingga pada gilirannya ia atau kelompok tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pula mampu mencapai taraf kehidupan yang dianggap layak sesuai dengan harkat dan martabatnya. Di Indonesia kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah saat ini, tetapi karena kini gejalanya semakin sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh dibawah angka kesejahteraan negara-negara maju.

Pada beberapa tahun terakhir, menurut data Badan Pusat Statistik, terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami kenaikan tingkat kemiskinan. Beberapa faktor yang memungkinkan dalam beberapa periode tertentu penyebab kenaikan tingkat kemiskinan ini ialah adanya pergantian kebijakan oleh Pemerintahan Pusat yang secara tidak langsung berdampak kepada lapisan masyarakat tertentu. Seperti pada tabel yang tertera berikut ini, beberapa provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia mengalami kenaikan jumlah pada era pergantian Presiden tahun 2015. Dapat terlihat dengan jelas bahkan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan yang cukup signifikan disbanding tahun sebelum pergantian Presiden Joko Widodo. Seiring berjalannya waktu, wilayah-wilayah tersebut dapat beradaptasi dengan kebijakan yang baru dan dapat menurunkan kembali tingkat kemiskinan di wilayah mereka. Namun berdasarkan data tersebut terdapat satu wilayah yang tergolong kedalam salah satu wilayah dengan persentase penduduk miskin

tertinggi di Indonesia masih mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin hingga akhir tahun 2017, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 1.2 Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2012-2017**

No.	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	PAPUA	30.66	31.53	27.8	28.4	28.4	27.76
2	PAPUA BARAT	27.04	27.14	26.26	25.73	24.88	23.12
3	NUSA TENGGARA TIMUR	20.41	20.24	19.6	22.58	22.01	21.38
4	MALUKU	20.76	19.27	18.44	19.36	19.26	18.29
5	ACEH	18.58	17.72	16.98	17.11	16.43	15.92
6	BENGKULU	17.51	17.75	17.09	17.16	17.03	15.59
7	NUSA TENGGARA BARAT	18.02	17.25	17.05	16.54	16.02	15.05
8	SULAWESI TENGAH	14.94	14.32	13.61	14.07	14.09	14.22
9	SUMATERA SELATAN	13.48	14.06	13.62	13.77	13.39	13.1
10	LAMPUNG	15.65	14.39	14.21	13.53	13.86	13.04

Sumber: Data Olah Badan Pusat Statistik 2018

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah dengan jumlah penduduk sebesar 2.921.715 jiwa dengan wilayah seluas kurang lebih 61 ribu km<sup>2</sup>. Pembagian administrasi Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 12 kabupaten dan 1 kota. Pada umumnya, keadaan alam di wilayah Sulawesi Tengah tidak jauh berbeda dengan wilayah lainnya di Pulau Sulawesi. Bentangan pegunungan dan dataran tinggi mendominasi permukaan tanah di propinsi ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengakui adanya kesulitan dalam pengentasan kemiskinan di beberapa wilayah. Bila dibandingkan dengan wilayah Papua, Provinsi Sulawesi Tengah hanya memiliki potensi yang mendominasi di sektor pertanian. Dengan dominasi sektor pertanian ini pemerintah harus dapat mengoptimalkan pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas menunjang bagi sektor pertanian. Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan dalam APBD. Tingginya garis kemiskinan beberapa tahun belakangan yang juga

diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut telah meresahkan pemerintah.

Presiden Jokowi berjanji mengupayakan pemerataan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai 9,98 persen atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,02 persen. Disamping itu, persentase kemiskinan masih tinggi mencapai 14,09 persen di pertengahan tahun 2017. Pemerintah telah diimbau untuk melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata seperti revitalisasi bandara Mutiara, Jalan Tol Palu-Parigi dan pengembangan Pelabuhan Palu dan peningkatan kapasitas Pelabuhan Parigi. Ini karena meski provinsi ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, angka kemiskinan masih terbilang tinggi. Selain memperhatikan kesiapan infrastruktur pendukung seperti tenaga listrik, air bersih, sarana dan prasarana pekerja, Presiden juga menekankan pentingnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja lokal dan aspek kelestarian lingkungan. Pentingnya peran pendidikan serta sarana dan prasarana pekerja ini nantinya akan berdampak pada konsep pembangunan manusia yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Dari produktivitas ini, pemerintah mengharapkan tercapainya tujuan dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Penelitian Terdahulu Oleh Adi Widodo, Waridin, Dan Johanna Maria pada Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan tahun 2011 yang berjudul *"Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah"*, didapatkan hasil bahwa adanya pengaruh signifikan secara simultan antara pengeluaran pemerintah

sektor kesehatan dan pendidikan serta Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang penelitian tersebut adalah permasalahan pada wilayah tersebut yaitu rendahnya pembangunan dan rendahnya Indeks Pembangunan manusia serta tingginya tingkat kemiskinan pada tahun 2007-2008. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor publik tidak dapat secara independen mempengaruhi kemiskinan, melainkan pengeluaran pemerintah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan IPM sebagai mediasi yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hal ini juga diperkuat dengan hasil studi yang menunjukkan bahwa selain berperan sebagai variabel *pure moderator*, IPM juga berperan sebagai variabel intervening dalam mengentaskan kemiskinan suatu wilayah.

Dalam permasalahan yang terdapat pada Provinsi Sulawesi Tengah, adanya *gap* antara penelitian terdahulu bahwa Provinsi Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan perekonomian yang diikuti peningkatan IPM namun disamping itu juga diikuti oleh peningkatan kemiskinan. Penggunaan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sebagai variabel independen dan IPM sebagai variabel *intervening* terhadap kemiskinan akan tetap dipertahankan untuk menyesuaikan dengan kondisi wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan sebagai perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mencakup 11 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dua kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara tidak disertakan dalam penelitian dikarenakan kedua daerah tersebut merupakan daerah pemekaran dari daerah lainnya dan kurangnya ketersediaan data dari kedua kabupaten tersebut. Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan ini, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH *PUBLIC SECTOR EXPENDITURE* TERHADAP INDEKS



## PEMBANGUNAN MANUSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH”.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh langsung pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia langsung terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah?
3. Bagaimana pengaruh tidak langsung pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah melalui Indeks Pembangunan Manusia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh langsung pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah melalui Indeks Pembangunan Manusia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat memahami pengaruh langsung pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Dapat memahami pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Dapat memahami pengaruh tidak langsung pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah melalui Indeks Pembangunan Manusia.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 Konsep Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan oleh Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Pengertian IPM itu sendiri menurut UNDP merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM merupakan bentuk penjelasan sederhana mengenai bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Terdapat tiga dimensi dasar yang membentuk IPM seperti: (i) Umur panjang dan hidup sehat; (ii) pengetahuan dan; (iii) standar hidup layak. Masing-masing dari ketiga dimensi tersebut membentuk beberapa indikator dalam perhitungan IPM yang diantaranya: (i) Angka Harapan Hidup saat lahir; (ii) Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta; (iii) Pengeluaran perkapita disesuaikan.

Indikator pembangunan manusia dilihat berdasarkan tingkat indeks pembangunan manusianya atau disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu: (i) masa hidup (*longevity*); (ii) pengetahuan (*knowledge*); dan (iii) standar kehidupan (*decent living*) (BPS-Bappenas-UNDP, 2001). IPM mencoba memeringkat dari skala 0 (tingkat pembangunan manusia yang paling rendah) hingga 100 (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi) berdasarkan tiga tujuan atau produk akhir pembangunan. Untuk menjamin tercapainya tujuan

pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

#### 1. Produktivitas

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

#### 2. Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan social. Semua hambata yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

#### 3. Kesinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan social harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

#### 4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi

dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat (Sukmaraga, 2011). Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas perumusan kebijakan dan penentuan program pembangunan. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu:

1. Indeks Harapan Hidup
2. Indeks Pendidikan
3. Indeks Standar Hidup Layak



### 2.1.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik

Pengeluaran Pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut pendapat Keynes dalam Sadono Sukirno (2000) bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga.

#### A. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan

Menurut Wahid (2012:85) Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori *human capital* bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Menurut Bastias (2011:50), mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari

pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Myrdal, 2000). Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah yang telah ditempuh adalah peningkatan akses kesehatan terutama bagi penduduk miskin melalui pelayanan kesehatan gratis; peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk polio dan flu burung; peningkatan kualitas, keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar; peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; penjaminan mutu, keamanan dan khasiat obat dan makanan; penanganan kesehatan di daerah bencana; serta peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (Myrdal, 2000).

Kemampuan untuk bertahan hidup lama diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*/e0). Angka e0 untuk tingkat provinsi yang disajikan merupakan hasil penghitungan secara tidak langsung dengan menggunakan paket program *Mortpack* berdasarkan data rata-rata jumlah anak lahir dengan rata-rata jumlah anak masih hidup yang menurut umur ibu 15-49 tahun, yang bersumber dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan memperlihatkan tren hasil sensus penduduk. Selain angka kematian bayi, Angka Harapan Hidup (AHH) juga digunakan sebagai indikator untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Semakin tinggi nilai angka harapan hidup di

suatu wilayah, maka mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi terutama yang terkait dengan fasilitas kesehatan wilayah tersebut semakin maju. Semakin maju pembangunan daerah di bidang kesehatan menunjukkan tingkat kesehatan yang ada dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Berdasarkan teori mengenai lingkaran kemiskinan yang dikemukakan Myrdal bahwa semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai AHH maka produktivitas akan semakin meningkat. Peningkatan produktivitas dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Artinya semakin tinggi angka harapan hidup maka tingkat kemiskinan akan menurun.

#### **B. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan**

Menurut Sulaiman Asang (2012:25) Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga *investment in human capital*. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan disuatu wilayah. Isu mengenai sumber daya manusia (*human capital*) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pasca tahun 1776, yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara, dengan mengisolasi dua faktor, yaitu pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia.

Menurut Wahid (2012:80) Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat

dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Siregar dan Wahyuniarti, 2008). Pendidikan dibagi tiga , yaitu:

#### 1. Pendidikan Formal

Adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi jenjang pendidikan formal:

- a. Pendidikan Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS).
- b. Pendidikan Menengah, merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), serta bentuk lain yang sederajat.

- c. Pendidikan Tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, dll.

## 2. Pendidikan Non Formal

Adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan dengan terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal.

## 3. Pendidikan Informal

Adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun informal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

### C. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Infrastruktur

Infrastruktur tidak kalah pentingnya dengan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan ekonomi suatu negara dapat terwujud. Infrastruktur terdiri dari beberapa subsektor, beberapa diantaranya yang cukup dominan dalam pembangunan ekonomi adalah perumahan dan transportasi. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi akan mampu melakukan pemerataan pembangunan kemudian melakukan pembangunan infrastruktur keseluruhan bagian wilayahnya. Perekonomian yang terintegrasi membutuhkan pembangunan infrastruktur. Menurut kajian ilmiah yang dilakukan Deni Friawan (2008) menjelaskan setidaknya ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Pertama, ketersediaan infrastruktur yang

baik merupakan mesin utama pemacu pertumbuhan ekonomi, misalnya studi The World bank (2004) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam beberapa tahun terakhir pasca krisis ekonomi 1998 salah satunya dipengaruhi rendahnya tingkat investasi. Kurangnya ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu hambatan utama dalam perbaikan iklim investasi di Indonesia. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi. Penurunan tarif akibat integrasi ekonomi tidak dapat menjamin bahwa akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi tanpa adanya dukungan dari infrastruktur yang memadai. Ketiga, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara-negara di Asia dan juga mempercepat integrasi perekonomian Asia.

Pengeluaran pemerintah melalui pembangunan berbagai macam infrastruktur yang tepat diharapkan mampu menambah kapasitas ekonomi dengan memberikan efek multiplier. Dengan menggunakan fasilitas yang tepat, dapat diintegrasikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dengan efisien seperti pembangunan jalan dan jembatan. Disamping itu, pembangunan infrastruktur dapat mendorong munculnya pusat-pusat aktivitas ekonomi baru seperti industri dan pasar. Sehingga dengan jarak yang lebih dekat antara pelaku-pelaku ekonomi dengan pusat-pusat aktivitas perekonomian, akan mengurangi biaya ekonomi. Untuk itu, diperkenalkan infrastruktur sebagai penentu fungsi produksi, yang mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. memperbesar pasar, dan berfungsi menurunkan hambatan perdagangan. Bank Dunia (2005) menunjukkan bahwa infrastruktur merupakan penentu utama dari peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Masalah yang tersisa kemudian bagaimana



menyediakan infrastruktur tersebut, strategi yang komprehensif diperlukan untuk penyediaan infrastruktur yang memadai. Strategi tersebut harus menargetkan manajemen publik yang lebih baik, perencanaan yang lebih baik dan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih konsisten.

#### **D. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik dengan Pembangunan Manusia**

Realisasi belanja pemerintah terhadap pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur merupakan wujud nyata dari investasi pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan yang berupa pembangunan sekolah, perlengkapan sarana dan prasarana pendidikan, dan program-program yang mendukung pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Di samping itu, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang berupa pembangunan rumah sakit, puskesmas, penyediaan alat bantu kesehatan dan lain sebagainya dapat mengurangi tingkat kematian bayi dan menaikkan angka harapan hidup.

Adalah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang publik. Teori *public finance* (Musgrave, 1989) mengungkapkan bahwa tidak seluruhnya semua masalah ekonomi diselesaikan oleh mekanisme pasar seperti halnya dengan *social goods*. *Social goods* yang dimaksud terkait dengan eksternalitas, distribusi pendapatan, masalah-masalah ekonomi lainnya (pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan lain-lain). Dalam hal tersebut mekanisme pasar gagal menyelesaikannya (*market failure*). Pasar pada hakekatnya adalah wahana untuk mengekspresikan kebebasan individu, untuk mencari keuntungan individual. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas perekonomian yang bersifat kolektif publik dan atau aktivitas tidak bermotif keuntungan tidak bisa diselenggarakan

oleh pasar. Karena adanya kegagalan pasar dan dalam kaitannya dengan ketiga peran pemerintah sebagai peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilitasi, maka kewajiban publik di bidang pendidikan dan kesehatan yang tidak disentuh oleh pasar, menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya.

Peranan pemerintah disini adalah sebagai penyedia kewajiban publik di bidang pendidikan dan kesehatan yang tidak disentuh oleh pasar karena adanya kegagalan pasar dan dalam kaitannya dengan peranan pemerintah sebagai peranan alokasi, peranan distribusi, dan peranan stabilisasi. Menurut *Center for the Study of Living Standards* (2001) dalam Toyamah, dkk (2004) menyatakan bahwa pendidikan adalah elemen penting untuk memerangi kemiskinan, memberdayakan perempuan, serta menyelamatkan anak-anak dari upaya eksploitasi. Demikian juga pernyataan dari UNICEF yang mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi yang penting untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi. Investasi publik di bidang pendidikan dan kesehatan akan memberikan kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber daya manusia (SDM) handal yang sehat menjadi semakin bertambah. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan kerja serta berkurangnya kemiskinan.

### **2.1.3 Kemiskinan**

Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Hal tersebut sangat berhubungan erat dengan

kualitas hidup. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara umum faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan antara lain: pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003), pendidikan (Siregar dan Wahyuniarti, 2008), pengangguran (Todaro, 2003), kependudukan (Todaro, 2003), dan kesehatan (Myrdal, 2000).

Menurut Chambers (1998) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1. Kemiskinan (*proper*), 2. Ketidakberdayaan (*powerless*), 3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4. Ketergantungan (*dependence*), dan 5. Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan bukan hanya kekurangan uang ataupun tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti: keterbatasan sumber daya, tingkat kesehatan rendah, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dapat dibagi dengan empat bentuk (Suryawati, 2005), yaitu:

1. Kemiskinan Absolut yaitu bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja;
2. Kemiskinan Relatif yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan;
3. Kemiskinan Kultural yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau

berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar;

4. Kemiskinan Struktural yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi sering kali menyebabkan suburnya kemiskinan.

#### **A. Penyebab Kemiskinan**

Ditinjau dari sumber penyebabnya, kemiskinan dapat dibagi menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan kultural biasanya dicirikan oleh sikap individu atau kelompok masyarakat yang merasa tidak miskin meskipun jika diukur berdasarkan garis kemiskinan termasuk kelompok miskin. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang, baik karena perbedaan kepemilikan, kemampuan, pendapatan dan kesempatan kerja yang tidak seimbang maupun karena distribusi pembangunan dan hasilnya yang tidak merata. Kemiskinan struktural biasanya dicirikan oleh struktur masyarakat yang timpang terutama dilihat dari ukuran-ukuran ekonomi.

Kemiskinan memang merupakan masalah multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Kondisi kemiskinan setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: Pertama, rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan berdampak pada keterbatasan dalam pengembangan diri dan mobilitas. Hal ini berpengaruh terhadap daya kompetisi dalam merebut atau memasuki dunia kerja. Kedua, rendahnya derajat kesehatan dan gizi berdampak pada rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan selanjutnya akan mengurangi

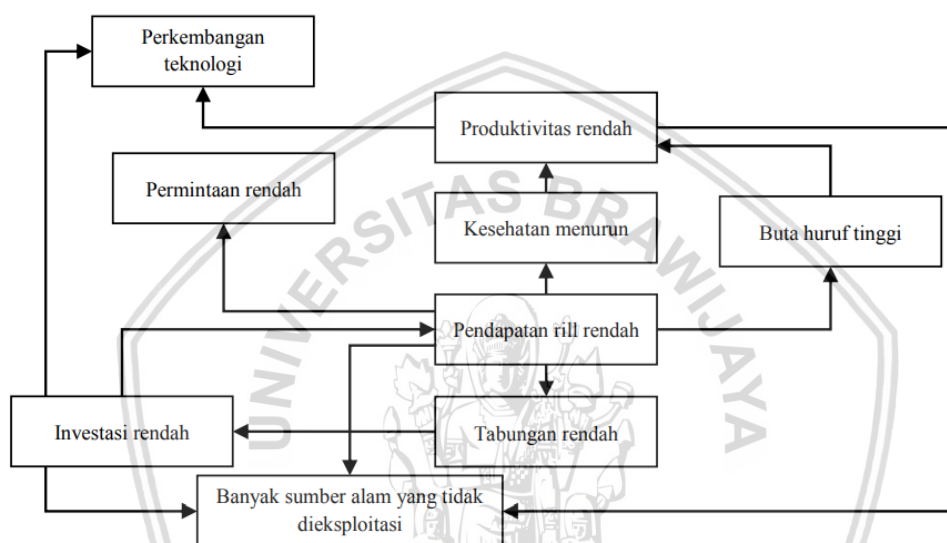
inisiatif. Ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan semakin memperburuk kemiskinan. Dengan bekerja setidaknya membuka kesempatan untuk mengubah nasibnya. Keempat, kondisi terisolasi (terpencil) mengakibatkan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain tidak dapat menjangkaunya. Kelima, ketidakstabilan politik berdampak pada ketidakberhasilan kebijakan pro-poor. Berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan akan mengalami kesulitan dalam implementasi jika tidak didukung oleh kondisi politik yang stabil.

## B. Teori Kemiskinan

Sharp, et al (1996) dalam Mudrajat Kuncoro (2004) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse (1953) dalam Kuncoro, 2004, yang mengatakan: *"a poor country is poor because it is poor"* (Negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima.

Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Mudrajad Kuncoro, 2004). Berikut gambar lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*):

**Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan**



Sumber: Nurkse (1953) dalam Kuncoro (2004)

Menurut pendapatnya, inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Di Negara berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi, menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi negara berkembang mencapai pembangunan yang pesat yaitu dari segi penawaran modal dan permintaan modal.



Dari segi penawaran modal lingkaran setan kemiskinan dapat dinyatakan sebagai berikut. Tingkat pendapatan masyarakat rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitasnya akan tetap rendah yang akan mempengaruhi kemiskinan.

Dari segi permintaan modal, corak lingkaran setan kemiskinan mempunyai bentuk yang berbeda di setiap negara. Di negara-negara miskin perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, dan hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat rendah. Sedangkan pendapatan masyarakat yang rendah disebabkan oleh produktivitasnya rendah ditunjukkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu dan mengakibatkan pada masa yang akan datang. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal, sehingga kemiskinan tidak berujung pada pangkalnya.

Menurut Budhi (2013) yang mengutip pendapat Chambers bahwa ada lima “ketidakberuntungan” yang melingkari orang atau keluarga miskin yaitu sebagai berikut:

- a. Kemiskinan (*poverty*) memiliki tanda-tanda sebagai berikut: rumah mereka reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim, ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang serta pendapatan yang tidak menentu;
- b. Masalah kerentanan (*vulnerability*), kerentanan ini dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin menghadapi situasi darurat. Perbaikan ekonomi yang dicapai dengan susah payah sewaktu-waktu dapat lenyap

- ketika penyakit menghampiri keluarga mereka yang membutuhkan biaya pengobatan dalam jumlah yang besar;
- c. Masalah ketidakberdayaan. Bentuk ketidakberdayaan kelompok miskin tercermin dalam ketidakmampuan mereka dalam menghadapi elit dan para birokrasi dalam menentukan keputusan yang menyangkut nasibnya, tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasi dirinya;
  - d. Lemahnya ketahanan fisik karena rendahnya konsumsi pangan baik kualitas maupun kuantitas sehingga konsumsi gizi mereka sangat rendah yang berakibat pada rendahnya produktivitas mereka;
  - e. Masalah keterisolasian. Keterisolasian fisik tercermin dari kantong-kantong kemiskinan yang sulit dijangkau sedang keterisolasian sosial tercermin dari ketertutupan dalam integrasi masyarakat miskin dengan masyarakat yang lebih luas.

### **C. Ukuran Kemiskinan**

Pada umumnya terdapat dua indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Mengukur kemiskinan dengan mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif (Tambunan, 2001).

#### **a. Kemiskinan Absolut**

Kemiskinan absolut merupakan ketidakmampuan seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup setiap hari. Kebutuhan minimum tersebut diterjemahkan dalam ukuran finansial (uang). Nilai minimum tersebut digunakan sebagai batas garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan

secara riil, sehingga dapat ditelusuri kemajuan yang diperoleh dalam menanggulangi kemiskinan pada level absolut sepanjang waktu. World bank menggunakan ukuran kemiskinan absolut ini untuk menentukan jumlah penduduk miskin. Menurut world bank, penduduk miskin adalah mereka yang hidup kurang dari US\$1 per hari dalam dolar PPP (Purchasing Power Parity). Akan tetapi, tidak semua negara mengikuti standar minimum yang digunakan world bank tersebut, karena bagi negara-negara berkembang level tersebut masihlah tinggi, oleh karena itu banyak negara menentukan garis kemiskinan nasional sendiri dimana kriteria yang digunakan disesuaikan dengan kondisi perekonomian masing-masing negara. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan kemiskinan absolut Indonesia merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum energi kalori (2.100 kilo kalori per kapita per hari) yang dipergunakan tubuh dan kebutuhan dasar minimum untuk sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan dasar lain.

#### b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subyektif. Mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Kemiskinan relatif ini digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Badan pemerintah yang menggunakan ukuran kemiskinan relatif misalnya BKKBN. BKKBN mendefinisikan miskin atau kurang sejahtera dalam pengertian Pembangunan Keluarga Sejahtera yang terdiri atas keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera. Keluarga pra-sejahtera adalah keluargakeluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan

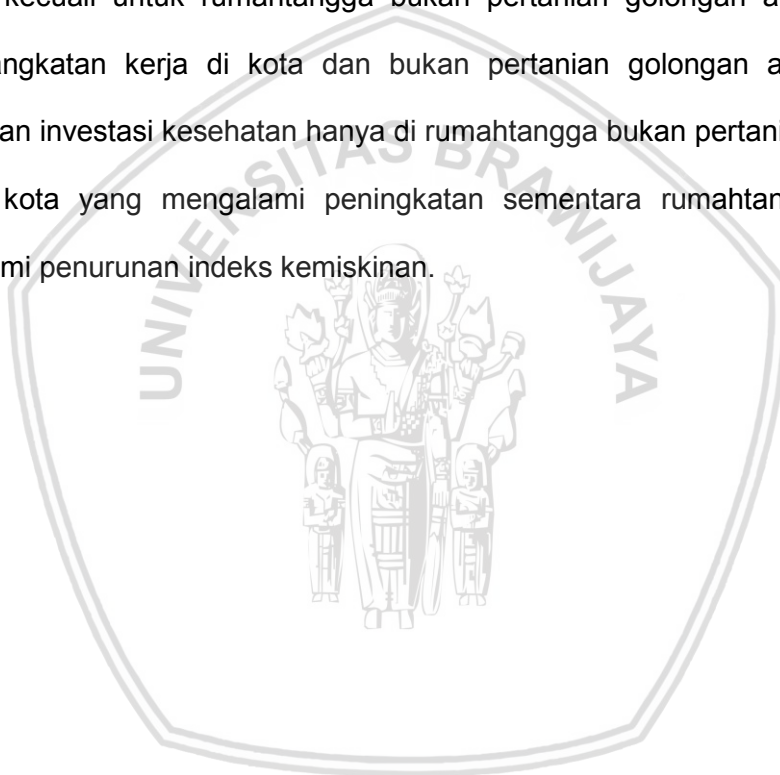
spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan keluarga berencana. Sedangkan keluarga sejahtera adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, serta kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

#### **D. Hubungan Konsep Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan**

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital), peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mampu mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang sehingga akan mampu membantu dalam mengurangi angka kemiskinan. Beberapa hasil kajian dan penelitian telah diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat. Asian Development Bank (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dinamis telah banyak mengurangi kemiskinan. Jumlah penduduk yang berjuang untuk hidup dengan \$ 1 atau kurang per hari telah turun dari 900 juta tahun 1990 menjadi 600 juta sekarang. Ini dapat diartikan sebagai peningkatan pendidikan, kesehatan yang lebih baik, usia yang lebih panjang, dan kesempatan yang lebih besar. Siregar dan Wahyuniarti (2008) meneliti mengenai dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin walaupun dengan magnitude yang relatif kecil, seperti inflasi, populasi penduduk, share sektor pertanian, dan sektor industri.

Selain itu Sjafi'i dan Hidayati (2009) menyatakan bahwa Tersedianya SDM yang berkualitas ini merupakan syarat penting berlangsungnya pembangunan

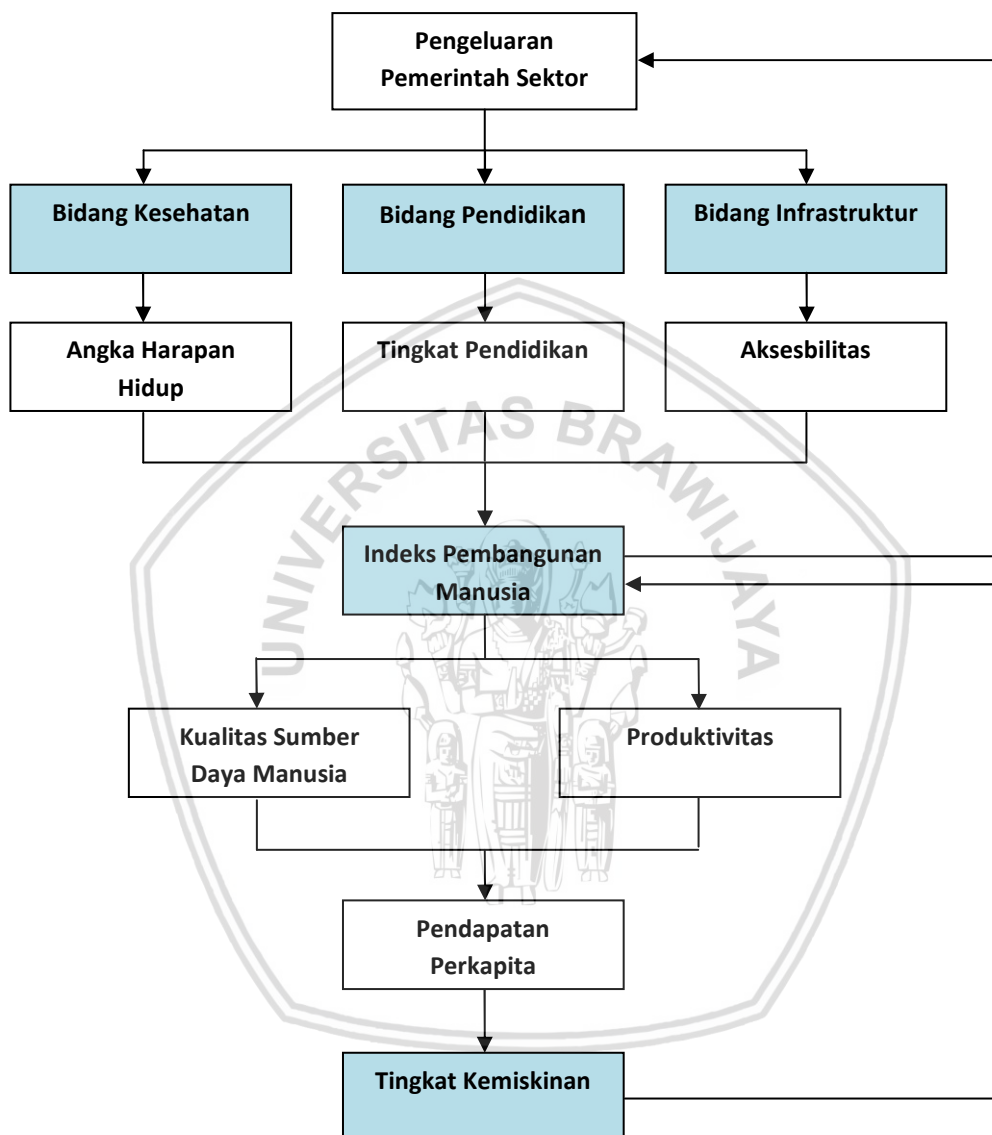
ekonomi secara berkesinambungan. Pengalaman pembangunan ekonomi negara macan Asia (Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Hongkong) membuktikan investasi modal manusia (lewat proses pendidikan) lebih “mujarab” dibanding investasi fisik (gedung, infrastruktur lainnya). Sitepu dan Sinaga (2003) mengkaji mengenai dampak investasi sumber daya manusia terhadap kemiskinan diperoleh hasil bahwa Investasi sumberdaya manusia untuk pendidikan dapat menurunkan poverty incidence, poverty depth dan poverty severity kecuali untuk rumahtangga bukan pertanian golongan atas di desa, bukan angkatan kerja di kota dan bukan pertanian golongan atas di kota, sedangkan investasi kesehatan hanya di rumahtangga bukan pertanian golongan atas di kota yang mengalami peningkatan sementara rumahtangga lainnya mengalami penurunan indeks kemiskinan.



## 2.2 Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**



Sumber: Penulis 2017

Menurut Novianto Dwi Wibowo (2003), esensi utama dari masalah kemiskinan adalah masalah aksesibilitas. Aksesibilitas dalam hal ini berarti kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk dapat mencapai atau mendapatkan sesuatu yang sebenarnya merupakan kebutuhan dasarnya dan seharusnya menjadi haknya sebagai manusia dan sebagai warga



negara. Seseorang atau sekelompok orang yang miskin, akan mempunyai aksesibilitas yang rendah dan terbatas terhadap berbagai kebutuhan dan layanan dibandingkan mereka yang termasuk golongan menengah maupun golongan kaya. Akses-akses yang tidak bisa didapat oleh masyarakat miskin yaitu:

1. Akses untuk mendapatkan makanan yang layak
2. Akses untuk mendapatkan sandang yang layak
3. Akses untuk mendapatkan rumah yang layak
4. Akses untuk mendapatkan layanan kesehatan baik dan layak
5. Akses untuk mendapatkan layanan pendidikan
6. Akses kepada *leisure* dan *entertainment*
7. Akses untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik dengan terpenuhinya semua *basic need* dan *supporting needs*.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara ketersediaan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai dengan kemiskinan. Pendapat tersebut juga merupakan pengembangan dari teori yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse mengenai Lingkaran Setan Kemiskinan bahwa salah satu penyebab suatu Negara mengalami kemiskinan adalah karena kegagalan pasar dan kurangnya modal yang mengakibatkan kurangnya produktifitas masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan modal untuk meningkatkan produktifitas sumber daya manusia diperlukan upaya mendukung yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat itu sendiri. Upaya Pemerintah tersebut dapat berupa pembiayaan, penyediaan fasilitas dan subsidi terhadap barang-barang publik yang dapat

berhubungan langsung terhadap masyarakat seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pengeluaran Pemerintah sektor public yang dalam penelitian ini berfokus pada bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang masing-masing akan mempengaruhi angka harapan hidup masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, dan kapasitas perekonomian masyarakat. Ketiga hal tersebut merupakan dasar yang berpengaruh terhadap konsep pembangunan manusia yang disimplikasikan kedalam Indeks Pembangunan Manusia. Tinggi rendahnya Indeks tersebut dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan produktivitas mereka. Pada akhirnya, produktivitas dan kualitas sumber daya manusia tersebut pula yang menentukan pendapatan perkapita di masyarakat, yang berimplikasi pada tingkat kemiskinan suatu Negara.

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis awal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga bahwa adanya pengaruh langsung pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Diduga bahwa adanya pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah.
3. Diduga bahwa adanya pengaruh tidak langsung pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah melalui Indeks Pembangunan Manusia sebagai *intervening*.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif lebih menekankan pada analisis data-data yang bersifat numerik kemudian di olah sehingga menghasilkan kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut dapat diketahui hubungan signifikan antara variabel yang diteliti dan memperjelas gambaran objek yang diteliti.

#### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang dipilih untuk penelitian ini adalah wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan 11 Kabupaten/Kota yang terdapat didalamnya yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu. Peneliti memilih untuk meneliti wilayah Provinsi Sulawesi Tengah karena provinsi ini mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin pada beberapa periode belakangan. Waktu yang disebutkan dalam penelitian ini terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

#### 3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

##### A. Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. (Sugiyono, 2013:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kemiskinan. Pada penelitian ini menggunakan data Persentase

Kemiskinan di 11 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2012-2016.

### **B. Variabel Independen (bebas)**

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab adanya perubahan atau timbulnya variabel dependen serta dapat mempengaruhi variabel dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian yaitu Public Sector Expenditure yang berupa:

- a. Realisasi Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan (X1) adalah rasio Realisasi Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan dengan total Realisasi APBN menurut fungsi per kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2012-2016. Variabel tersebut dihitung dalam satuan persen
- b. Realisasi Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan (X2) adalah rasio Realisasi Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dengan total Realisasi APBN menurut fungsi per kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2012-2016. Variabel tersebut dihitung dalam satuan persen
- c. Realisasi Pengeluaran Pemerintah sektor Infrastruktur (X3) adalah rasio Realisasi Pengeluaran Pemerintah sektor Infrastruktur dengan total Realisasi APBN menurut fungsi per kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2012-2016. Variabel tersebut dihitung dalam satuan persen
- d. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (Y) digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Variabel Indeks Pembangunan Manusia/IPM (Y) juga berfungsi sebagai variabel perantara (*intervening*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah IPM per kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2012-2016.

**Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel**

No.	Variabel	Definisi	Skala Pengukuran	Satuan Ukuran
1.	Realisasi pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan (X1)	Realisasi pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan merupakan tindakan/upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.	Rasio	Persen
2.	Realisasi pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan (X2)	Realisasi pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan merupakan tindakan/upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.	Rasio	Persen
3.	Realisasi pengeluaran pemerintah sektor Infrastruktur (X3)	Realisasi pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur merupakan tindakan/upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu hak rakyat dalam mendapatkan fasilitas-fasilitas fisik yang dapat menunjang kehidupan bermasyarakat.	Rasio	Persen
4.	Indeks Pembangunan Manusia/IPM (Y)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).	Interval	Indeks

No.	Variabel	Definisi	Skala Pengukuran	Satuan Pengukuran
5.	Kemiskinan (Z)	Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. (Sumber: BPS)	Rasio	Persen

Sumber: Penulis 2018

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada dari berbagai sumber seperti buku-buku, literatur, catatan-catatan, internet, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Data yang digunakan bersifat data panel, yaitu data yang merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))
2. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id))
3. Literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.5 Metode Analisis

Dalam menjawab rumusan masalah yang disebutkan pada bab sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan metode analisis jalur secara deskriptif. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel



dependen apakah masing-masing dari variabel independen berhubungan positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

### **A. Uji Persyaratan Analisis**

Dalam melakukan analisis regresi disyaratkan untuk melakukan beberapa uji persyaratan analisis atau uji asumsi klasik. Tujuan dilakukannya uji asumsi klasik adalah untuk memperoleh perkiraan yang tidak bias dan efisien dari persamaan regresi linear berganda. Beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi antara lain:

#### **1. Uji Linearitas**

Bertujuan untuk mengetahui model yang akan dibuktikan merupakan model linear atau tidak. Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan curve fit dan menerapkan prinsip parsimony, yaitu bilamana seluruh model signifikan atau non signifikan berarti dapat dikatakan model berbentuk linear. Pengaruh antar variabel dinyatakan linear jika (1) model linear signifikan atau nilai Sig Linear < 0,05, atau (2) seluruh model yang mungkin adalah non signifikan atau seluruh model memiliki nilai Sig > 0,05.

#### **2. Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan dengan maksud memeriksa apakah data yang berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan adalah:

$$D = \text{SUP}x[F_n(x) - F_o(x)]$$

Dimana nilai D adalah nilai deviasi absolut maksimal antara  $F_n(x)$  dan  $F_o(x)$ .

Nilai D selanjutnya dibandingkan dengan nilai D kritis untuk ukuran tes alfa ( $\alpha$ ).

Tujuan uji normalitas data ini adalah untuk memeriksa / mengetahui apakah data

populasi berdistribusi normal. Menurut Santoso (2000) pedoman yang dipakai dalam uji normalitas ini adalah menggunakan uji Kolmogorov Smirnov yaitu:

Jika nilai signifikansi  $> \alpha$  ( $\alpha$ ) distribusi adalah normal

Jika nilai signifikansi  $< \alpha$  ( $\alpha$ ), distribusi adalah tidak normal

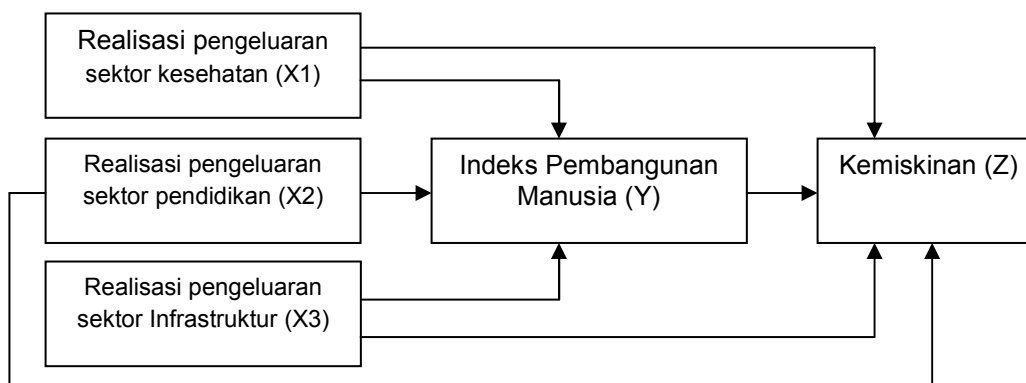
## **B. Analisis Jalur/Path Analysis**

Secara umum tahapan analisis jalur dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

### **1. Model Analisis Jalur**

Menurut Muhidin dan Abdurahman (2007) analisis jalur/path analysis adalah alat analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis pola hubungan kausal antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung, baik secara serempak maupun secara sendiri-sendiri beberapa variabel penyebab terhadap sebuah variabel akibat. Pada saat melakukan analisis jalur atau path analysis terlebih dahulu dilakukan pembentukan jalur yang dapat dilihat dari akar kuadrat yang terbentuk dari nilai Koefisien Determinasi (R-Square). Setelah tahapan tersebut dilakukan masing masing variabel yang dibentuk kedalam analisis jalur harus memiliki pengaruh langsung yang signifikan dengan variabel dependen. Jika salah satu variabel yang diuji tidak memenuhi syarat maka variabel tersebut di eliminasi dari pengujian analisis jalur.

Pada penelitian ini analisis jalur/path analysis digunakan yaitu untuk menganalisis pengaruh kualitas Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik terhadap Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel *intervening*. Model penelitian yang dapat dijadikan pedoman analisis jalur adalah:

**Gambar 3.1 Model Analisis Jalur/Path Analysis**

Sumber: Penulis 2018

Dari bagan analisis jalur tersebut dapat di atas maka dapat diturunkan menjadi dua sub struktur dalam melakukan analisis jalur.

Keterangan:

X1 = Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

X2 = Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

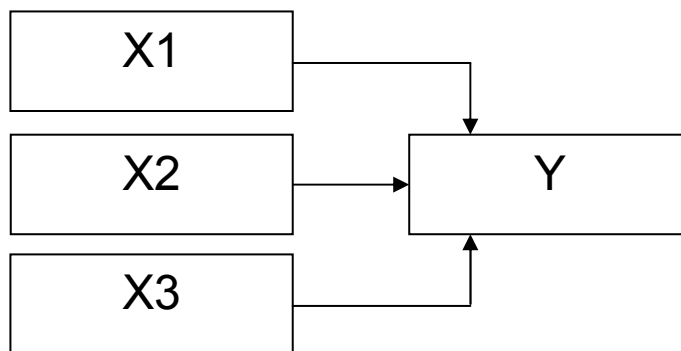
X3 = Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur

Y = Indeks Pembangunan Manusia

Z = Persentase Kemiskinan

Berdasarkan model analisis jalur di atas, Realisasi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X1). Realisasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X2), dan Realisasi pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur (X3) dilakukan uji regresi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) secara langsung. Adapun variabel X1, X2, X3, dan Y juga dilakukan uji regresi untuk mengetahui pengaruhnya secara langsung terhadap Kemiskinan (Z). Dari hasil kedua regresi tersebut maka akan didapatkan nilai koefisien yang menunjukkan kontribusi ataupun pengaruh dari variabel X1, X2, dan X3 secara tidak langsung terhadap Z melalui variabel perantara yaitu Y.

**Gambar 3.2 Substruktur 1 Model Analisis Jalur/Path Analysis**

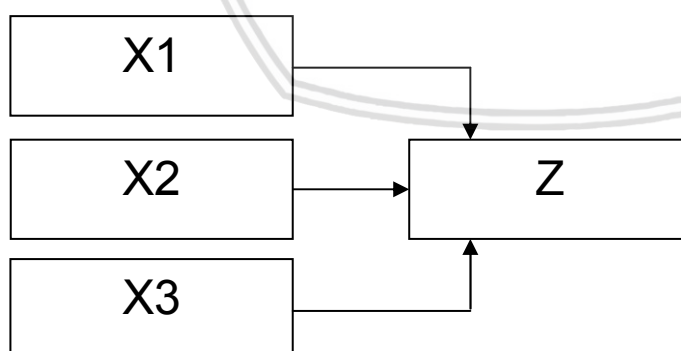


Sumber: Penulis 2018

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u \dots \dots \dots (p1)$$

Koefisien jalur variabel Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X1), Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X2), dan Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur (X3) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y), menggambarkan besarnya pengaruh langsung Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah.

**Gambar 3.3 Substruktur 2 Model Analisis Jalur/Path Analysis**



Sumber: Penulis 2018

$$Z = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u \dots \dots \dots (p2)$$

Koefisien jalur variabel Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X1), Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X2), dan Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur (X3) terhadap Persentase Kemiskinan (Z), menggambarkan besarnya pengaruh langsung Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah.

**Gambar 3.4 Substruktur 3 Model Analisis Jalur/Path Analysis**



Sumber: Penulis 2018

$$Z = \beta_0 + \beta_1 Y_1 + u \dots \dots \dots (p3)$$

Koefisien jalur variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y) terhadap Persentase Kemiskinan (Z), menggambarkan besarnya pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah.

$$Z = p2 + (p1 * p3)$$

Dimana:

P2 = Pengaruh langsung variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

P1 \* P3 = Pengaruh tidak langsung variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan infrastruktur terhadap Jumlah Penduduk Miskin melalui variabel Indeks Pembangunan Manusia sebagai *intervening*.

Koefisien jalur variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X1), Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X2), dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur (X3) terhadap Persentase Kemiskinan (Z) melalui variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y), menggambarkan besarnya pengaruh tidak langsung Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah melalui Indeks Pembangunan Manusia.

## 2. Menentukan Koefisien Jalur

Menentukan koefisien jalur, yaitu besarnya pengaruh variabel penyebab dan variable akibat (Sitepu, 1994) dengan menghitung koefisien jalur, dengan rumus:

$$Py_{xi} = by_{xi} \sqrt{\frac{\sum_{h=1}^n X^2_{ih}}{n \sum_{h=1}^n Y^2_{ih}}} ; i = 1 \text{ dan } 2$$

Keterangan:

$Py_{xi}$  = Koefisien jalur dari variabel  $X_i$  terhadap  $Y$

$by_{xi}$  = Koefisien regresi dari variabel  $X_i$  terhadap  $Y$

Selanjutnya ditentukan besarnya pengaruh variabel lain terhadap variabel dependen dengan rumus sebagai berikut:

$$P_{ye} = \sqrt{1 - R^2_{Yx1 \dots x2}}$$

Dimana:

$R^2_{Yx1 \dots xk}$  = koefisien yang menyatakan determinasi total dari semua semua variabel penyebab terhadap variabel akibat.

## C. Uji Hipotesis

Selanjutnya dilakukan pengujian signifikan pengaruh variable bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan kaedah uji F dan uji t, dimana



penerapan uji F digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat, sedangkan uji t penerapannya digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Seberapa besar pengaruhnya ditentukan oleh hasil akhir pengujian ini. Apakah ada pengaruhnya atau tidak, uji ini menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Uji F untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat:

$$F = \frac{(n-k-1) \sum_{i=1}^k Pyx_i r_{yx_i}}{k(1 - \sum_{i=1}^k Pyx_i r_{yx_i})}$$

Ho diterima jika F-hitung  $\leq$  F-tabel

Ha ditolak jika F-hitung  $>$  F-tabel

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengolahan data dengan bantuan program SPSS. Menurut Santoso (2002) menyatakan bahwa dasar pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis adalah:

Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  (taraf kepercayaan 95 %), maka terdapat pengaruh yang berarti dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  (taraf kepercayaan 95 %), maka tidak terdapat pengaruh yang berarti dari variabel bebas terhadap variabel terikat

2. Uji t untuk melihat pengaruh secara parsial setiap variabel bebas terhadap variabel terikat:

$$t_i = \frac{Pyx_i}{\sqrt{\frac{(1 - R^2_{yx_1 \dots x_k})(\sum_{h=1}^n x_{ih}^2)}{n-k-1}}} : i = 1 \text{ dan } 2$$

Dimana:

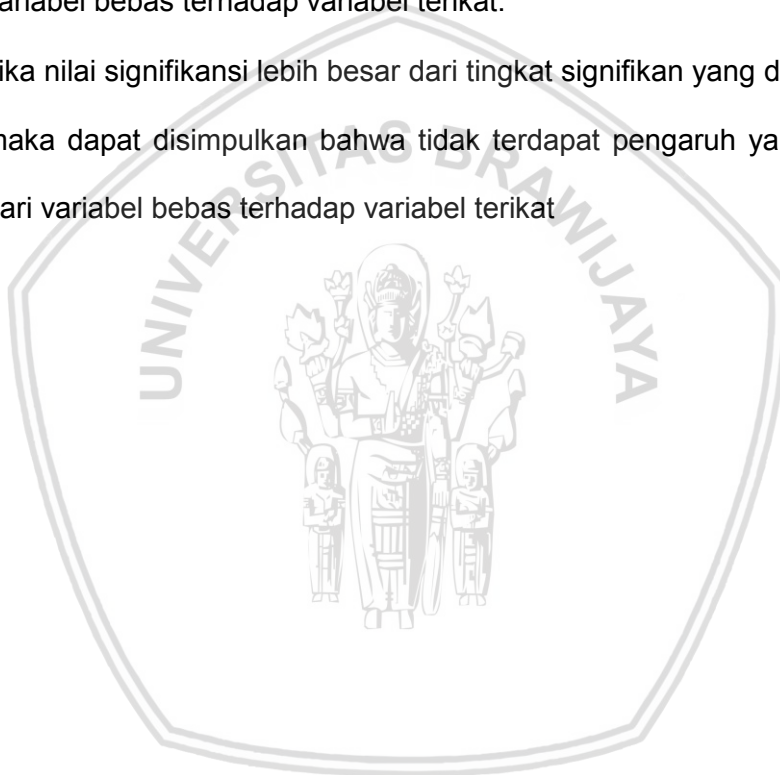
to' = koefisien nilai tes

$b_i$  = koefisien jalur

$S_{b_i}$  = standar kesalahan koefisien jalur

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengolahan data dengan bantuan program SPSS. Menurut Santoso (2002) menyatakan bahwa dasar pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis adalah:

- Jika nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan ( $\alpha$ ) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- Jika nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan ( $\alpha$ ) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibukota Provinsi Kota Palu, terletak di antara 2° 22' Lintang Utara – 3° 48' Lintang Selatan dan 199° 22' – 124° 22' Bujur Timur. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi terluas di Pulau Sulawesi, dengan luas wilayah daratan 63.330 km<sup>2</sup> dan luas wilayah laut 189.480 km<sup>2</sup>. Adapun batas wilayah Provinsi Sulteng :

- Sebelah Utara: Laut Sulawesi & Provinsi Maluku
- Sebelah Timur: Provinsi Maluku
- Sebelah Selatan: Provinsi Sulawesi Selatan & Provinsi Sulawesi Utara
- Sebelah Barat: Selat Makassar

Secara administratif Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota, yakni: 1) Kabupaten Banggai; 2) Kabupaten Banggai Kepulauan; 3) Kabupaten Buo; 4) Kabupaten Donggala; 5) Kabupaten Morowali; 6) Kabupaten Parigi Moutong; 7) Kabupaten poso; 8) Kabupaten Tojo Una-Una; 9) Kabupaten Toli-Toli; 10) Kabupaten Sigi; 11) Kota Palu; 12) Kabupaten Banggai Laut; dan 13) Kabupaten Morowali Utara. Dua diantaranya yaitu Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara merupakan hasil pemekaran dari daerah sebelumnya sejak tahun 2013 dan 2014. Oleh sebab itu, kedua daerah hasil pemekaran tersebut tidak diikutsertakan dalam penelitian karena kurangnya data yang tersedia. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki jumlah penduduk sebesar 2.921.718 jiwa pada tahun 2016. Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi setelah provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 4.1 Kondisi Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 1971 – 2016**

No.	Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk
1.	1971 – 1980	3,86
2.	1980 – 1990	2,87
3.	1990 – 2000	2,57
4.	2000 – 2010	1,95
5.	2010 – 2016	1,67

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

#### **4.2 Deskripsi Variabel Penelitian**

##### **A. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X1)**

Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan diperoleh dari data keuangan daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam satuan rupiah yang di proxy kedalam satuan persen yang diteliti dari tahun 2012 sampai tahun 2016 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2 Rasio Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2016**

No.	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kab. Banggai Kepulauan	0.31	0.66	0.43	0.37	0.86
2.	Kab. Banggai	0.53	1.17	1.28	2.00	1.38

No.	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
3.	Kab. Morowali	0.55	1.30	0.53	1.89	1.30
4.	Kab. Poso	0.45	0.94	0.87	2.91	1.56
5.	Kab. Donggala	0.34	0.75	0.93	2.56	1.57
6.	Kab. ToliToli	0.43	0.88	0.97	1.00	1.24
7.	Kab. Buol	0.34	0.67	0.71	1.98	1.49
8.	Kab. Parigi Moutong	0.46	1.06	1.43	4.42	2.09
9.	Kab. Tojo Una Una	0.36	0.81	0.97	2.79	1.76
10.	Kab. Sigi	0.31	0.61	0.64	1.76	1.54
11.	Kota Palu	0.78	2.88	2.05	5.44	2.97

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan 2018

Dari tabel di atas, dapat terlihat jumlah yang fluktuatif dari masing-masing daerah pada setiap tahunnya. Pada tahun 2015 merupakan rata-rata kenaikan rasio tertinggi hampir di setiap daerah bila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk Kabupaten Toli-toli dan Kabupaten Sigi dapat terlihat selalu mengalami kenaikan rasio pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan pada setiap tahunnya sejak 2012 sampai dengan tahun 2016.

#### B. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X2)

Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan diperoleh dari data keuangan daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam satuan rupiah yang di proxy kedalam satuan

persen yang diteliti dari tahun 2012 sampai tahun 2016 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3 Rasio Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2016**

No.	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kab. Banggai Kepulauan	1.34	2.51	1.49	3.00	1.58
2.	Kab. Banggai	2.01	4.71	4.95	3.00	4.80
3.	Kab. Morowali	1.60	3.60	1.90	4.87	1.66
4.	Kab. Poso	2.16	3.68	4.13	5.00	3.36
5.	Kab. Donggala	1.96	3.97	3.85	9.89	3.08
6.	Kab. ToliToli	1.29	2.42	2.48	1.00	2.14
7.	Kab. Buol	1.22	2.29	2.31	6.06	2.31
8.	Kab. Parigi Moutong	1.62	2.61	3.82	9.90	3.64
9.	Kab. Tojo Una Una	1.16	2.31	2.43	6.07	2.29
10.	Kab. Sigi	1.61	3.22	3.07	8.32	3.26
11.	Kota Palu	2.43	5.36	5.09	2.00	4.41

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan 2018

Dari tabel di atas, rasio pengeluaran Pemerintah di bidang pendidikan cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan bidang kesehatan seperti pada paparan sebelumnya. Dapat terlihat di tahun yang sama yaitu 2015, hampir setiap daerah mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan ini juga



termasuk pengeluaran yang bersifat fluktuatif. Kenaikan dan penurunan dari pengeluaran pemerintah tidak dapat diprediksi secara akurat akan sebesar apa ditahun berikutnya.

### C. Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur (X3)

Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur diperoleh dari data keuangan daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam satuan rupiah yang di proxy kedalam satuan persen yang diteliti dari tahun 2012 sampai tahun 2016 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4 Rasio Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2016**

No.	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kab. Banggai Kepulauan	0.61	1.16	0.78	3.00	1.29
2.	Kab. Banggai	0.47	1.76	1.90	4.00	1.97
3.	Kab. Morowali	0.80	1.22	0.75	3.50	2.22
4.	Kab. Poso	0.45	1.19	1.26	3.09	2.69
5.	Kab. Donggala	0.46	1.39	0.94	2.06	1.36
6.	Kab. ToliToli	0.38	0.99	1.07	3.00	1.30
7.	Kab. Buol	0.56	0.83	0.87	2.30	1.58
8.	Kab. Parigi Moutong	0.52	1.08	1.01	2.86	1.28
9.	Kab. Tojo Una Una	0.45	0.64	0.69	1.92	1.07

No.	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
10.	Kab. Sigi	0.30	0.67	0.81	2.15	1.04
11.	Kota Palu	0.31	0.85	1.04	2.62	1.49

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan 2018

Berdasarkan tabel di atas, rasio pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan kedua rasio sebelumnya yaitu pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan. Hal ini kurang lebihnya dapat mencerminkan kearah mana kebijakan pemerintah di daerah tersebut. pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan dan kesehatan yang dapat berimplikasi langsung dan memiliki efek jangka panjang pada masyarakat.

#### D. Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Variabel Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari data publikasi Badan Pusat Statistik yang ditetapkan dalam satuan indeks yang diteliti dari tahun 2012 sampai tahun 2016 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.5 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah**

**Tahun 2012 – 2016**

No.	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kab. Banggai Kepulauan	61.09	61.74	62.33	62.97	63.45
2.	Kab. Banggai	65.44	66.39	67.11	67.44	68.17
3.	Kab. Morowali	66.48	66.86	67.91	69.12	69.69
4.	Kab. Poso	66.2	66.94	67.65	68.13	68.83

No.	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
5.	Kab. Donggala	61.33	63.38	63.55	63.82	64.42
6.	Kab. ToliToli	60.05	61.44	61.91	62.72	63.27
7.	Kab. Buol	63.98	64.5	65.41	65.61	66.37
8.	Kab. Parigi Moutong	61.13	61.98	62.2	62.79	63.6
9.	Kab. Tojo Una Una	59.55	60.32	61.15	61.33	62.27
10.	Kab. Sigi	62.88	64.1	64.64	65.35	65.95
11.	Kota Palu	78.36	78.65	79.12	79.63	79.73

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki nilai bertaraf sedang. Di sisi lain, indeks pembangunan ini masih cukup rendah bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia. Ketimpangan pada pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tengah masih dapat terlihat dengan jelas. Sebagai contohnya, Kota Palu sebagai satu-satunya kota dan sebagai Ibukota Provinsi, telah mencapai pembangunan manusia yang cukup besar dengan angka indeks berkisar 78 – 79. Di samping itu, di provinsi yang sama masih ada suatu wilayah yang pembangunan manusianya tergolong rendah seperti Kabupaten Tojo Una Una dengan angka indeks berkisar antara 59 – 62. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah wilayah tersebut untuk mengurangi ketidakmerataan dan mengatasi ketertinggalan di beberapa daerah di wilayah tersebut.

### E. Kemiskinan (Z)

Variabel Kemiskinan diperoleh dari data publikasi Badan Pusat Statistik yang ditetapkan dalam satuan persen yang diteliti dari tahun 2012 sampai tahun 2016 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.6 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2016**

No.	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kab. Banggai Kepulauan	30.1	29.4	28.24	18.57	18.72
2.	Kab. Banggai	35.3	33.8	32.45	34.74	33.97
3.	Kab. Morowali	37.7	35.4	34.04	17.79	17.36
4.	Kab. Poso	40.8	41.3	39.65	42.64	42.23
5.	Kab. Donggala	48.4	49.6	47.56	54.17	55.69
6.	Kab. ToliToli	30.7	30.7	29.46	30.7	30.68
7.	Kab. Buol	22.3	21.6	20.82	24.31	25.27
8.	Kab. Parigi Moutong	75	75.5	74.96	82.61	82.38
9.	Kab. Tojo Una Una	29.9	29.7	27.73	27.62	27.62
10.	Kab. Sigi	29.2	27.6	26.49	29.14	29.55
11.	Kota Palu	30.1	25.9	25.66	27.19	26.24

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Berdasarkan pada tabel di atas, persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah masih tergolong tinggi, bahkan untuk beberapa wilayah seperti

contohnya Kabupaten Parigi Moutong, memiliki angka yang sangat besar. Untuk beberapa wilayah di provinsi tersebut mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, namun sebagian besar lainnya mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin dapat bertambah disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kenaikan harga pangan. Pada tahun 2015 mayoritas daerah di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin yang disebabkan oleh naiknya harga pangan kebutuhan pokok. Kenaikan harga pangan ini mengakibatkan naiknya garis kemiskinan, sedangkan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut cenderung tetap.

#### 4.3 Hasil Analisis

Dalam proses mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pendapatan per kapita terhadap IPM di Provinsi Maluku, maka digunakan metode analisis jalur (*Path Analysis*). Melalui diagram jalur, secara garis besar sangat membantu untuk menggambarkan pola hubungan kausal antara sejumlah peubah, dan analisis jalur ini memiliki daya guna untuk mencetuskan atau menguji kausal yang diteorikan dan bukan untuk menurunkan teori kausal tersebut. Dalam metode analisis jalur ini, terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung artinya arah hubungan antara dua variabel langsung tanpa melewati variabel lain, sementara pengaruh tidak langsung harus melewati variabel lain. Untuk melihat besarnya pengaruh langsung antar variabel dengan menggunakan koefisien beta atau koefisien regresi yang distandardisasi. Sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung dalam *path analysis* adalah dengan cara mengalikan koefisien pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan model analisis jalur (Gambar 3.1), dapat disusun menjadi tiga model sub struktur

analisis jalur, yaitu sub struktur X1, X2, dan X3 terhadap Y, sub struktur X1, X2, dan X3 terhadap Z, serta sub struktur Y terhadap Z.

### A. Asumsi Klasik

#### Asumsi Normalitas

Pada analisis path, data yang digunakan adalah data yang berdistribusi normal. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian adalah sebagai berikut:

H<sub>0</sub> : Sebaran data berdistribusi normal

H<sub>a</sub> : Sebaran data tidak berdistribusi normal

Untuk menguji asumsi ini, digunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujian yang digunakan adalah tolak H<sub>0</sub> jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$ , dan sebaliknya terima H<sub>0</sub> jika nilai signifikansi  $> 0,05$ .

**Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov**

Model Persamaan	Sig.	Keterangan
Model 1	0,774	Terdistribusi normal
Model 2	0,148	Terdistribusi normal

Sumber: Penulis 2018

Berdasarkan pengujian Kolmogorov-Smirnov, pada masing-masing model persamaan 1 dan 2 diperoleh signifikansi sebesar 0,774 dan 0,148 dimana nilai yang diperoleh lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$ . Oleh karena nilai signifikansi lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$ , maka diputuskan terima H<sub>0</sub> dan disimpulkan bahwa data yang digunakan pada masing-masing persamaan berdistribusi normal, sehingga disimpulkan asumsi normalitas terpenuhi.

### B. Analisis Jalur (Path)

Pada penelitian ini, analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Analisis ini digunakan untuk



mengetahui tingkat pengaruh pada suatu hubungan kausal antar variabel.

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian adalah sebagai berikut:

**1. Pengaruh pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan (X1), sektor pendidikan (X2), dan sektor infrastruktur (X3) terhadap IPM (Y)**

Hasil pengujian pengaruh pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan (X1), sektor pendidikan (X2), dan sektor infrastruktur (X3) terhadap IPM (Y) adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Hasil Regresi Variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y**

Variabel	Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
X1	0,566	3,488	0,001	Signifikan
X2	0,369	0,417	0,028	Signifikan
X3	0,062	0,380	0,071	Tidak signifikan
R Square = 0,464				
F Sig. = 0,002				
Variabel dependen = IPM (Y)				

Sumber: Penulis 2018

Berdasarkan pada tabel, ketiga variabel X1, X2, dan X3 yang masing-masing merupakan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sektor infrastruktur memiliki nilai R Square sebesar 0,464. Hal ini menunjukkan ketiga variabel dapat menjelaskan pengaruh variabel IPM (Y) sebagai variabel dependen sebesar 46,4%. Secara parsial, masing-masing variabel X1 dan X2 memiliki nilai signifikansi 0,001 dan 0,028. Kedua nilai ini berada dibawah nilai  $\alpha = 0,05$  yang berarti berdasarkan hipotesis awal  $H_0$  ditolak atau kedua variabel independen masing-masing berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

dependen. Variabel X3 memiliki nilai signifikansi 0,071. Nilai ini berada diatas nilai  $\alpha = 0,05$  yang berarti berdasarkan hipotesis awal H0 diterima atau variabel X3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Disamping itu, ketiga variabel independen X1, X2, dan X3 secara simultan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Hal ini dapat terlihat dari nilai F Sig. yang bernilai 0,002 berada dibawah nilai  $\alpha = 0,05$ , maka berdasarkan hipotesis H0 ditolak atau variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pada keadaan nyata di Provinsi Sulawesi Tengah, angka signifikan yang dihasilkan oleh variabel realisasi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan manusia dapat terlihat dari kualitas pelayanan kesehatan yang masih kurang seperti jumlah dokter yang rasio nya masih jauh dibawah 40 per 100.000 penduduk disuatu wilayah. Pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan dana lebih besar pada penyediaan sarana dan prasarana aparatur kesehatan. Di samping itu, pada sektor pendidikan Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kelengkapan sarana pendidikan, namun kualitas dari para pendidik itu sendiri yang masih kurang. Kedua sektor ini signifikan terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia walaupun masih ada beberapa kendala yang menghambat yang membuat pertumbuhan IPM tidak begitu besar di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena alokasi anggaran pada infrastruktur masih rendah. Selain itu juga infrastruktur merupakan proyek jangka panjang yang tidak dapat dilihat hasilnya dalam rentang waktu yang pendek.

## 2. Pengaruh pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan (X1), sektor pendidikan (X2), dan sektor infrastruktur (X3) terhadap Kemiskinan (Z)

Hasil pengujian pengaruh pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan (X1), sektor pendidikan (X2), dan sektor infrastruktur (X3) terhadap Kemiskinan (Z) adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Hasil Regresi Variabel X1, X2, X3, dan Y terhadap Z**

Variabel	Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
X1	0,363	1,971	0,054	Tidak signifikan
X2	0,303	1,797	0,078	Tidak signifikan
X3	0,301	1,809	0,076	Tidak signifikan
Y	-0.423	-2.967	0.005	Signifikan
R Square = 0,484 F Sig. = 0,009 Variabel dependen = Kemiskinan (Z)				

Sumber: Penulis 2018

Berdasarkan pada tabel, keempat variabel X1, X2, X3, dan Y yang masing-masing merupakan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sektor infrastruktur, serta IPM memiliki nilai R Square sebesar 0,484. Hal ini menunjukkan ketiga variabel dapat menjelaskan pengaruh variabel Kemiskinan (Z) sebagai variabel dependen sebesar 48,4%. Secara parsial, masing-masing variabel X1, X2, dan X3 memiliki nilai signifikansi 0,001, 0,028, dan 0,076. Ketiga nilai ini berada diatas nilai  $\alpha = 0,05$  yang berarti berdasarkan hipotesis awal H0 diterima atau ketiga variabel independen masing-masing tidak

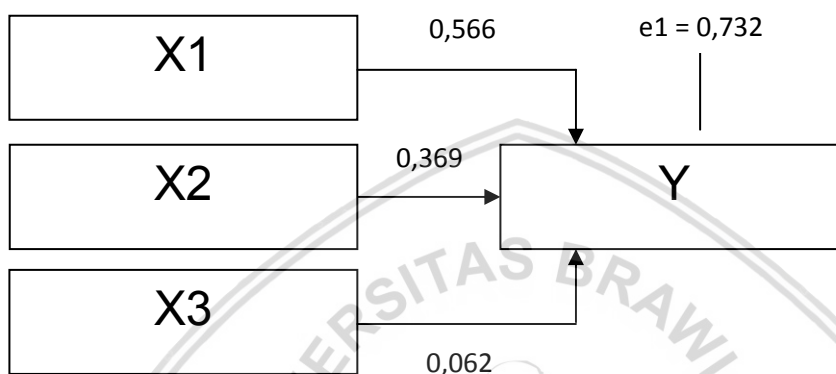
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Variabel Y memiliki nilai signifikansi 0,005. Nilai ini berada dibawah nilai  $\alpha = 0,05$  yang berarti berdasarkan hipotesis awal  $H_0$  ditolak atau variabel Y berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Disamping itu, keempat variabel independen X1, X2, X3, dan Y secara simultan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Z. Hal ini dapat terlihat dari nilai F Sig. yang bernilai 0,009 berada dibawah nilai  $\alpha = 0,05$ , maka berdasarkan hipotesis  $H_0$  ditolak atau variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pada keadaan nyata di Provinsi Sulawesi Tengah, ketiga variabel yaitu pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur tidak dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan secara langsung. Ketiga sektor pengeluaran ini memang pada dasarnya dianggarkan pada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan produktivitas mereka. Peningkatan produktivitas ini akan menumbuhkan perekonomian dan menurunkan tingkat kemiskinan pada wilayah tersebut. di samping itu, variabel Indeks Pembangunan Manusia dapat berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui proses penganggaran yang dimaksudkan oleh pemerintah pada sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penekanan dalam peningkatannya yang dialami oleh beberapa faktor, hal ini yang mengakibatkan tingkat kemiskinan di Provinsi ini meningkat. Kenaikan IPM hanya terjadi di beberapa wilayah sedangkan beberapa wilayah lainnya tetap mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi.

### Model Path Analysis

Berdasarkan hasil regresi dari model regresi pertama (X1, X2, X3, terhadap Y) pada persamaan di atas, maka dapat dibentuk nilai koefisien dari masing-masing sub struktur analisis jalur sebagai berikut:

**Gambar 4.1 Model Persamaan/Sub Struktur 1 Analisis Jalur**



Sumber: Penulis 2018

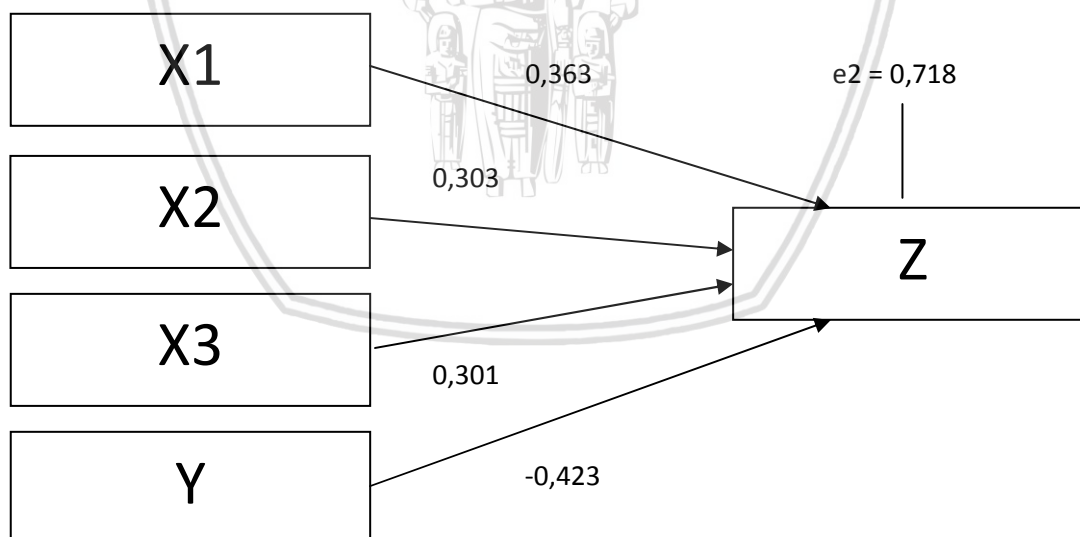
- Pengaruh langsung variabel X1 terhadap Y menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,566 yang merupakan pengaruh signifikan, maka dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berkontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 56,6%. Artinya setiap perubahan 1 persen pada pengeluaran pemerintah sektor kesehatan akan memberikan kontribusi perubahan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 56,6%.
- Pengaruh langsung variabel X2 terhadap Y menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,369 merupakan pengaruh signifikan, maka dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berkontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 36,9%. Artinya setiap perubahan 1 persen pada pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan akan

memberikan kontribusi perubahan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 36,9%.

- Pengaruh langsung variabel X3 terhadap Y menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,062 merupakan pengaruh tidak signifikan, maka dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berkontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 6,2%. Artinya setiap perubahan 1 persen pada pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur akan memberikan kontribusi perubahan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 6,2%.

Adapun berdasarkan hasil regresi dari model regresi kedua (X1, X2, X3, dan Y terhadap Z) pada persamaan di atas, maka dapat dibentuk nilai koefisien dari masing-masing sub struktur analisis jalur sebagai berikut:

**Gambar 4.2 Model Persamaan/Sub Struktur 2 Analisis Jalur**



Sumber: Penulis 2018

- Pengaruh langsung variabel X1 terhadap Z menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,363 dan merupakan pengaruh tidak signifikan, maka dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berkontribusi

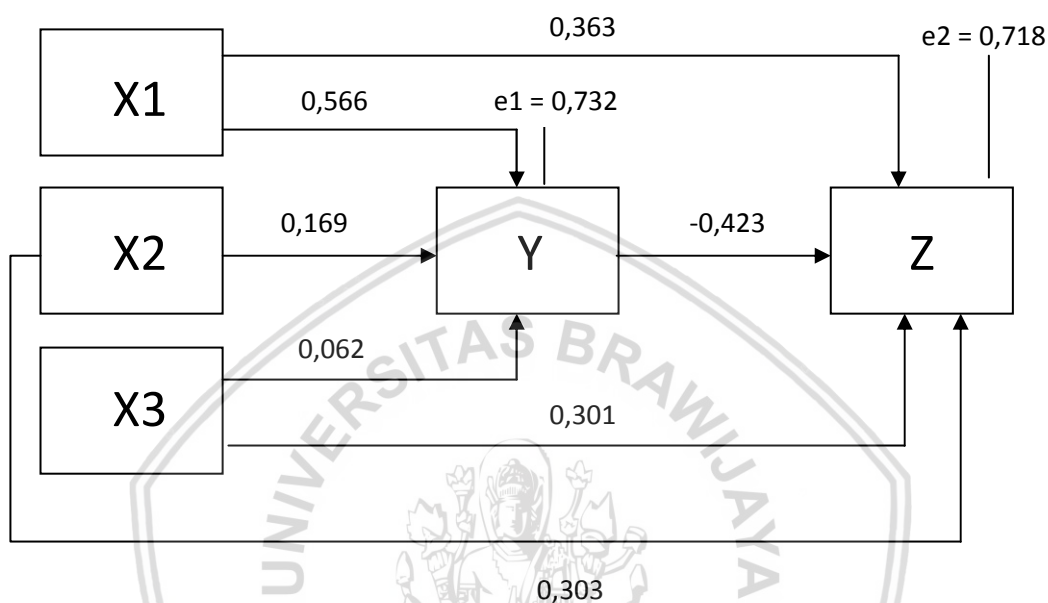


terhadap jumlah penduduk miskin sebesar 36,3%. Artinya setiap perubahan 1 persen pada pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan akan memberikan kontribusi perubahan terhadap Kemiskinan sebesar 36,3%.

- Pengaruh langsung variabel X2 terhadap Z menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,303 dan merupakan pengaruh tidak signifikan, maka dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berkontribusi terhadap jumlah penduduk miskin sebesar 30,3%. Artinya setiap perubahan 1 persen pada pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan akan memberikan kontribusi perubahan terhadap Kemiskinan sebesar 30,3%.
- Pengaruh langsung variabel X3 terhadap Z menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,301 dan merupakan pengaruh tidak signifikan, maka dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berkontribusi terhadap jumlah penduduk miskin sebesar 30,1%. Artinya setiap perubahan 1 persen pada pengeluaran pemerintah sektor Infrastruktur akan memberikan kontribusi perubahan terhadap Kemiskinan sebesar 30,1%.
- Pengaruh langsung variabel Y terhadap Z menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,423 dan merupakan pengaruh signifikan negatif, maka dapat dikatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berkontribusi negatif terhadap jumlah penduduk miskin sebesar 42,3%. Artinya setiap perubahan 1 persen pada Indeks Pembangunan Manusia akan memberikan kontribusi perubahan secara negative atau berbalik terhadap Kemiskinan sebesar 36,9%.

Adapun berdasarkan hasil regresi dari dua model regresi pada persamaan di atas, maka dapat dibentuk nilai koefisien dan total pengaruh yang membentuk model analisis jalur sebagai berikut:

**Gambar 4.3 Model Analisis Jalur**



Sumber: Penulis 2018

- Pengaruh tidak langsung antara X1 terhadap Z melalui Y diperoleh dari hasil kali pengaruh langsung antara X1 terhadap Y dan pengaruh langsung antara Y terhadap Z sehingga diperoleh pengaruh tidak langsung sebesar  $0,566 \times -0,423 = -0,239$ . Total pengaruh X1 terhadap Z adalah penjumlahan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel X1 terhadap variabel Z sebesar  $0,363 + 0,239 = 0,602$  atau dapat dikatakan bahwa X1 memiliki total pengaruh sebesar 60,2% terhadap Z. Karena pengaruh langsung antara X1 terhadap Y adalah signifikan dan pengaruh langsung antara Y terhadap Z adalah signifikan, maka pengaruh tidak langsung X1 terhadap Z melalui Y adalah signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia

merupakan variabel intervening (perantara) yang baik sebagai variabel perantara antara variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Kemiskinan.

- Pengaruh tidak langsung antara X2 terhadap Z melalui Y diperoleh dari hasil kali pengaruh langsung antara X2 terhadap Y dan pengaruh langsung antara Y terhadap Z sehingga diperoleh pengaruh tidak langsung sebesar  $0,369 \times -0,423 = -0,156$ . Total pengaruh X2 terhadap Z adalah penjumlahan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel X2 terhadap variabel Z sebesar  $0,303 + 0,156 = 0,459$  atau dapat dikatakan bahwa X2 memiliki total pengaruh sebesar 45,9%. Karena pengaruh langsung antara X2 terhadap Y adalah signifikan dan pengaruh langsung antara Y terhadap Z adalah signifikan, maka pengaruh tidak langsung X2 terhadap Z melalui Y adalah signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan variabel intervening (perantara) yang baik sebagai variabel perantara antara variabel pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan terhadap Kemiskinan.
- Pengaruh tidak langsung antara X3 terhadap Z melalui Y diperoleh dari hasil kali pengaruh langsung antara X3 terhadap Y dan pengaruh langsung antara Y terhadap Z sehingga diperoleh pengaruh tidak langsung sebesar  $0,062 \times -0,423 = -0,026$ . Total pengaruh X3 terhadap Z adalah penjumlahan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel X3 terhadap variabel Z sebesar  $0,301 + 0,026 = 0,327$  atau dapat dikatakan bahwa X3 memiliki total pengaruh sebesar 32,7%. Karena pengaruh langsung antara X3 terhadap Y adalah tidak signifikan dan pengaruh langsung antara Y terhadap Z adalah signifikan, maka

pengaruh tidak langsung X3 terhadap Z melalui Y adalah tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan variabel intervening (perantara) yang baik sebagai variabel perantara antara variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap Kemiskinan.

#### 4.4 Pembahasan

##### 1. Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan terhadap Kemiskinan

Dari hasil penelitian ini diketahui pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan negative terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengeluaran pemerintah sektor kesehatan maka akan semakin tinggi pula IPM, disamping itu, dengan meningkatnya IPM akan menurunkan jumlah penduduk miskin. Hasil analisis tersebut di atas, yang menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor publik tidak berpengaruh secara langsung terhadap pengurangan kemiskinan, juga terbukti dalam studi yang dilakukan oleh Adi Widodo (2011). Dalam studi ini mengatakan Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat diproksikan kedalam Indeks Pembangunan Manusia, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kesejahteraan. Sementara itu, tingkat kesejahteraan akan terkait dengan tingkat kemiskinan.

Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah belum cukup baik dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan

masyarakat akan fasilitas-fasilitas kesehatan. Besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji dan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sesuai dengan pasal 171 ayat 1 dan 2. Pasal 172 ayat 1 bahwa alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. Masih banyak wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki fasilitas kesehatan yang kurang memadai, khususnya di daerah berbukitan dan lain sebagainya.

Selain itu, keterbatasan akses dari masyarakat di beberapa daerah terhadap fasilitas kesehatan yang memadai di Provinsi Sulawesi Tengah juga turut menjadi penyebab masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah ini. Apabila pemerintah provinsi ini dapat lebih memperhatikan pengalokasian anggaran daerah terhadap aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan dengan lebih baik maka hal itu memungkinkan adanya faktor penopang bagi pengaruh realisasi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat dan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Adapun faktor lainnya yaitu kepercayaan masyarakat di daerah pedesaan, seperti pada perbukitan dan pegunungan terhadap fasilitas kesehatan yang ada masih sangat kurang. Masyarakat pedesaan ini masih memiliki kepercayaan yang mereka pegang seperti pada cenayang yang dapat menyembuhkan penyakit yang dialami oleh anggota keluarga mereka.

Menurut Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Tengah, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin terutama dipicu oleh kenaikan harga

barang kebutuhan pokok. Yakni, seperti beras, ikan, telur, gula, dan mie instan. Selain itu, peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin juga dipicu tingginya konsumsi rokok di kalangan penduduk miskin. Hal ini menyebabkan pergeseran preferensi masyarakat terhadap konsumsi kebutuhan pokok menjadi kebutuhan tersier seperti rokok yang justru akan menurunkan kualitas kesehatan dari masyarakat itu sendiri.

## **2. Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan terhadap Kemiskinan**

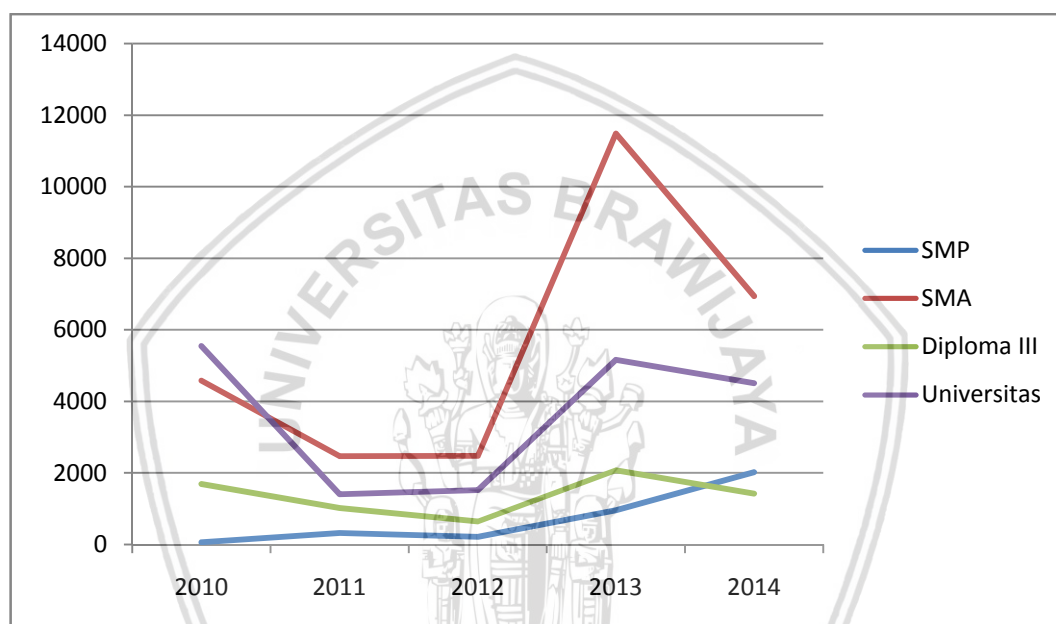
Dari hasil penelitian ini diketahui pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan negative terhadap persentase kemiskinan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan maka akan semakin tinggi pula tingkat Indeks Pembangunan Manusia, namun disamping itu dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia akan menurunkan persentase Kemiskinan. Provinsi Sulawesi Tengah masih mengalami ketimpangan dalam pendidikan. Salah satu indikatornya adalah masih rendahnya kualitas guru di provinsi ini.

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2015, Provinsi Sulawesi Tengah menempati urutan 29 dari 34 provinsi di Indonesia. Dengan peraihan poin sebesar 50,13 provinsi ini berada di posisi lima dari bawah, satu tingkat di bawah Sulawesi Barat 50,15 poin dan di atas Papua Barat 49,13 poin. Rendahnya mutu pendidikan di Sulawesi Tengah yang masih dibawah standar pendidikan nasional, serta rendahnya kualitas guru di daerah ini, disebabkan belum meratanya guru dan infrastruktur pendidikan yang ada.



Tenaga pendidik di wilayah ini masih terpusat di Ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten. Tentunya hal ini juga menjadi faktor yang menyulitkan untuk memacu peningkatan kualitas mutu pendidikan di Sulawesi Tengah dan juga sebagai faktor rendahnya pembangunan manusia di wilayah ini.

**Gambar 4.4 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010 – 2014**



Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Dari grafik di atas, dapat terlihat bahwa jumlah pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikan didominasi oleh masyarakat lulusan Sekolah Menengah Atas dan seajarnya. Mutu dari pendidikan akhir masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah masih tergolong cukup rendah. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah harus lebih selektif dan lebih ketat dalam menentukan tenaga kerja pendidik di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas sumber daya itu sendiri. Dengan begitu, bidang pendidikan akan dapat lebih meningkatkan dan lebih berperan dalam pembangunan manusia di wilayah

tersebut demi mengurangi tingkat kemiskinan yang terus meningkat beberapa tahun terakhir.

Pergerakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir bergerak lambat. Dari 2010, IPM provinsi penghasil kakao ini baru 63,29 poin dan saat ini baru berada pada angka 66 poin. Angka itu masih jauh dari provinsi lainnya di Indonesia seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Perolehan angka IPM untuk Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini telah dicapai oleh dua provinsi tetangganya itu sejak enam tahun lalu. Bahkan Sulawesi Utara pada 2010 sudah mencapai 67,83 poin. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor yang memungkinkan kurangnya produktivitas masyarakat yang mengakibatkan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan persentase kemiskinan. Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable development) dan pemerataan maupun pengentasan kemiskinan, sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik.

### **3. Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor Infrastruktur terhadap Kemiskinan**

Dari hasil penelitian ini diketahui pengeluaran pemerintah sektor Infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia maupun terhadap persentase kemiskinan. Hasil yang tidak signifikan antara pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia maupun terhadap persentase kemiskinan mungkin disebabkan oleh

beberapa faktor. Salah satu penyebabnya ialah masih rendahnya alokasi anggaran pemerintah pada bidang infrastruktur. Provinsi Sulawesi tengah memiliki kondisi geografis yang didominasi oleh bukit dan pegunungan. Hal ini bisa menjadi kendala bagi pemerintah dalam pemerataan dan akses bagi masyarakat itu sendiri untuk mencapai fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Kurangnya perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap akses yang seharusnya disediakan untuk masyarakat juga menyebabkan masih tingginya tingkat ketimpangan di wilayah tersebut. daerah perkotaan seperti Kota Palu dengan kabupaten-kabupaten yang cenderung berada di perbatasan dengan provinsi lainnya memiliki perbedaan Indeks Pembangunan Manusia maupun perbedaan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan. Selain kurangnya alokasi dana pemerintah di bidang infrastruktur, budaya yang masih dipegang erat oleh beberapa masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat yang masih tinggal di daerah pegunungan, turut menjadi faktor lain di luar dari penelitian ini yang dapat menghambat pengaruh dari pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur itu sendiri terhadap Indeks Pembangunan Manusia maupun persentase Kemiskinan. Beberapa masyarakat yang masih tinggal di daerah pegunungan masih melakukan tradisi untuk selalu berpindah dari satu gunung ke pegunungan lainnya.

Adapun faktor lain yang mungkin menjadi alasan mengapa realisasi pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara langsung maupun terhadap Kemiskinan secara tidak langsung adalah adanya *gap* waktu yang panjang yang dibutuhkan dalam realisasi pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur. Misalnya saja pada suatu proyek pembangunan jalan arteri yang

menghubungkan suatu kota dengan kota lainnya membutuhkan jangka waktu diatas lima tahun hingga proyek tersebut bisa rampung. Selain itu pembangunan proyekdi Provinsi Sulawesi Tengah ini juga terhambat dengan kondisi geografis tanahnya yang tidak merata dan sangat jarang dataran yang landai. Kondisi ini mengakibatkan dibutuhkannya penelitian dengan rentang waktu lebih panjang untuk dapat melihat pengaruh realisasi pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap konsep pembangunan manusia maupun dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan dengan lebih baik.

Hubungan antara kurangnya akses dengan meningkatnya kemiskinan ini sesuai dengan teori tentang kemiskinan yang dikemukakan oleh Robert Chambers. Menurut Robert Chambers (1987), inti dari permasalahan kemiskinan adalah terletak pada apa yang dia sebut sebagai *Deprivation Trap* atau perangkap kemiskinan. Menurut Chambers perangkap kemiskinan terdiri dari lima unsur yaitu *pertama*, kemiskinan itu sendiri; *kedua*, kelemahan fisik; *ketiga*, keterasingan/kadar isolasi; *kempat*, kerentanan; dan *kelima* ketidakberdayaan. Kelima unsur perangkap kemiskinan ini saling berkaitan satu sama lain dan menjadi perangkap yang benar-benar mematikan bagi kehidupan masyarakat miskin(Suyanto, 2013:12). Dalam teori tersebut telah disebutkan keterasingan atau kadar isolasi dan ketidakberdayaan. Kedua unsure tersebut dapat merujuk pada akses masyarakat miskin terhadap fasilitas penyangga kehidupan mereka seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan lainnya, maka dari itu dibutuhkan akses yang memadai untuk mengurangi kemungkinan keterasingan tersebut.

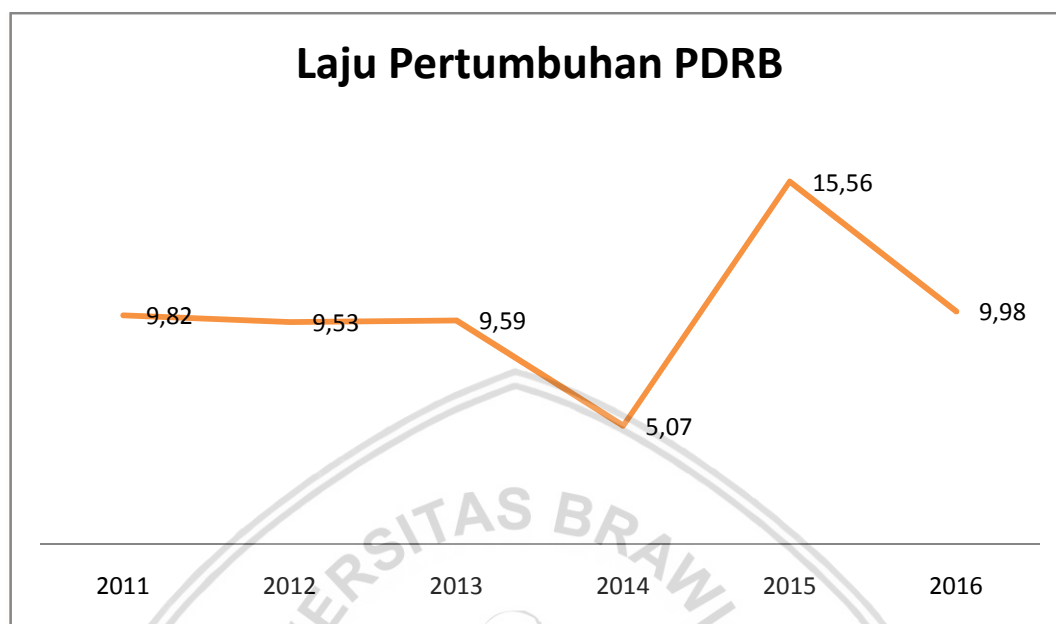
#### **4. Pengaruh IPM terhadap persentase Kemiskinan**

Terdapat hubungan penting antara IPM dan kapasitas pendapatan produktif. Pendapatan merupakan penentu utama dan hasil dari pembangunan manusia.

Penduduk miskin menggunakan tenaga mereka untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan yang diakibatkan oleh kurangnya pendidikan, serta gizi dan kesehatan yang buruk dapat mengurangi kapasitas mereka untuk bekerja. Dengan demikian, akibat rendahnya IPM adalah penduduk miskin tidak dapat mengambil keuntungan oportunitas pendapatan produktif karena terjadinya pertumbuhan ekonomi. Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) menjelaskan bahwa tingkat kesehatan dan pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan. Perbaikan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, dan anak-anak usia sekolah dapat bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang selanjutnya menyebabkan produktivitas meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang kemudian akan menyebabkan tingkat kemiskinannya berkurang.

Tingkat IPM dan kemiskinan mempunyai korelasi yang luas. Namun pertumbuhan IPM tidak secara otomatis mengurangi kemiskinan. Demikian pula, perbaikan kesehatan dan pendidikan yang menyebabkan peningkatan IPM tidak selalu mengarah pada penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan sumber daya yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk mempromosikan perbaikan indikator lainnya. Selain itu, struktur dan proses yang terjadi di masyarakat tidak dapat memberikan manfaat bagi kaum miskin. Masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat ganda dari pertumbuhan pendapatan serta peningkatan IPM jika pemerintah menggunakan manfaat dari pertumbuhan untuk membiayai pelayanan kesehatan dan akses pendidikan. Selain itu, struktur dan proses yang ada di masyarakat sudah tepat, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi juga dinikmati kaum miskin.

**Gambar 4.5 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011 – 2016**



Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Dari grafik di atas, laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Sulawesi Tengah atas dasar harga konstan pada tahun 2010, cenderung lebih banyak mengalami peningkatan dibandingkan dengan penurunannya. Data laju pertumbuhan ini mengabaikan adanya inflasi akibat dari hal-hal tertentu seperti kenaikan harga pangan dan lain sebagainya. Grafik ini serupa seperti pada data IPM Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan fluktuasi namun lebih didominasi dengan peningkatannya. Hal ini berarti dengan meningkatnya IPM, maka mampu meningkatkan produktivitas masyarakat yang dapat mendorong perekonomian dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Namun pada kenyataannya, tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kegagalan pasar, dimana pertumbuhan perekonomian hanya terjadi di beberapa wilayah atau terjadi pada beberapa sektor saja sehingga di beberapa wilayah lainnya tidak mengalami



dorongan perekonomian dan terjadi ketimpangan antar daerah. Ketimpangan ini sekilas dapat terlihat pada data yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu pada data Indeks Pembangunan Manusia maupun data Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada wilayah perkotaan yaitu Kota Palu cenderung mengalami pembangunan manusia lebih tinggi dan tingkat kemiskinan lebih rendah bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya.

Penjelasan tersebut juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse seperti yang telah dijelaskan pada bab 2. Lingkaran setan kemiskinan suatu wilayah salah satu faktor utamanya merupakan modal manusia. Konsep pembangunan manusia menunjukkan pentingnya bahwa ketika suatu masyarakat memiliki kualitas yang baik, dalam hal ini kualitas sumber daya manusia yang tinggi, maka hal tersebut dapat memicu produktivitas dari masyarakat itu sendiri. Dalam kasus ini, produktivitas masyarakat maupun peningkatan laju pertumbuhan PDRB tidak berimplikasi pada berkurangnya jumlah penduduk miskin. Kemungkinan dari ketidak sesuaian teori tersebut adalah dengan adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ketimpangan. Ketimpangan atau ketidak merataan aktivitas ekonomi di suatu wilayah dapat menyebabkan laju pertumbuhan tetap meningkat, namun di sisi lain di beberapa daerah tertentu cenderung stagnan ataupun menurun.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sektor kesehatan selama periode 2012 – 2016 telah menunjukkan pengaruh signifikan negative terhadap Persentase Kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan teori dan hipotesis yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya. Realisasi anggaran bidang kesehatan mengalami fluktuasi yang mengakibatkan penekanan peningkatan pembangunan manusia, berdasarkan penelitian hal ini menjadi penyebab meningkatnya persentase kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sektor Pendidikan selama periode 2012 – 2016 telah menunjukkan pengaruh signifikan negative terhadap Persentase Kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan teori dan hipotesis yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya. Realisasi anggaran bidang Pendidikan mengalami fluktuasi dan kurang efektif akibat dari rendahnya mutu para pendidik, berdasarkan penelitian hal ini menjadi penyebab meningkatnya persentase kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sektor Pendidikan selama periode 2012 – 2016 tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap Persentase Kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tergolong masih sangat sedikit. Pengeluaran yang

sedikit ini tidak dapat berpengaruh besar terhadap peningkatan IPM maupun untuk menurunkan persentase kemiskinan di wilayah tersebut. selain itu juga adanya ketidakmerataan infrastruktur antar wilayah menjadi penyebab hasil yang tidak signifikan dan adanya *gap* antara rentang waktu penelitian dengan proyek infrastruktur yang berjangka panjang juga dapat menjadi penyebab tidak relevannya faktor infrastruktur dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan.

4. Berdasarkan hasil statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa IPM sebagai variabel intervening berpengaruh signifikan negative terhadap persentase kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan teori dan hipotesis yang menduga bahwa variabel IPM mempunyai pengaruh yang signifikan negative terhadap variabel Persentase Kemiskinan. Artinya, semakin tinggi tingkat IPM maka semakin rendah tingkat persentase kemiskinan. Namun disamping itu, terdapat faktor lain yang menyebabkan angka IPM mengalami penekanan dan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di provinsi ini, antara lain adanya kenaikan harga kebutuhan pokok yang menekan daya beli masyarakat. Hal ini terjadi di daerah pedesaan yang mengakibatkan masih terjadi ketimpangan di wilayah-wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Daerah perkotaan yaitu Kota Palu dengan kabupaten-kabupaten lain disekitarnya memiliki gap tingkat IPM dan kemiskinan yang cukup tinggi.

## 5.2 Saran

Dalam rangka mengurangi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah maka diperlukan perbaikan pembangunan manusia di wilayah tersebut. perbaikan pembangunan manusia itu sendiri dapat dilakukan melalui alokasi anggaran pemerintah pada bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang lebih efisien dan efektif. Untuk mengoptimalkan pengeluaran, pemerintah perlu

mengalokasikan dana pada sektor-sektor yang berkesinambungan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan pengeluaran pemerintah guna mengurangi tingkat kemiskinan:

#### 1. Bidang Kesehatan

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maupun penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang kesehatan perlu untuk selalu dievaluasi. Perkembangan dunia kesehatan yang pesat menuntut para pekerja kesehatan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Jumlah dokter umum di Provinsi Sulawesi Tengah perlu ditambah karena masih sangat rendah rasionya terhadap penduduk di wilayah tersebut. Selain itu, anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada sektor kesehatan harus lebih stabil dan lebih ditingkatkan untuk mengurangi efek dari fluktuasi alokasi anggaran tersebut yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memfokuskan alokasi terhadap sektor kesehatan karena sektor ini mendominasi atau memiliki kontribusi yang paling besar dibandingkan sektor pendidikan dan sektor infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan.

#### 2. Bidang Pendidikan

Berkaitan dengan kurangnya mutu pendidikan dan mutu para pendidik di Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan untuk menetapkan standar mutu bagi para pendidik maupun kualitas pendidikan itu sendiri. Pemerintah di wilayah tersebut perlu untuk lebih memantau penyampaian kurikulum yang efektif sesuai dengan undang-undang yang telah ada. Pemerintah Perlu meningkatkan anggaran untuk penyediaan

sarana dan prasarana di beberapa kabupaten yang sulit dijangkau seperti Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Tojo Una-Una.

### 3. Bidang Infrastruktur

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu untuk meningkatkan alokasi anggaran daerah pada bidang infrastruktur. Selain meningkatkan dana dan mengoptimalkan realisasinya, pemerintah perlu untuk menyusun strategi bagi proyek pembangunan yang berkesinambungan. Perbaikan infrastruktur untuk menunjang sektor pertanian yang menyumbang pemasukan PDRB di Provinsi Sulawesi Tengah juga diperlukan seperti perbaikan akses para petani menuju pasar untuk mengurangi biaya. Perlu dilakukan perbaikan jalan pada perbukitan maupun pegunungan, jalan yang menghubungkan antar kabupaten/kota agar mempermudah akses maupun mobilitas masyarakat.

### 4. Bidang lainnya

Dalam mengurangi kemungkinan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin akibat dari kenaikan harga komoditi, pemerintah harus mendistribusikan kebutuhan pokok lebih merata pada daerah-daerah pedesaan untuk mengurangi efek dari ketimpangan tersebut. Daya beli masyarakat merupakan sepertiga indikator dari pembangunan manusia selain indikator kesehatan dan pendidikan, namun penekanan tingkat inflasi menjadi hal yang harus dilakukan agar tidak terjadi permasalahan serupa pada periode-periode berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albornoz, M. A., Becker, M., Cahyat, A., Cronkleton, P., Jong, W.d., Evans, K., Wollenberg, E., 2007, *Menuju Kesejahteraan dalam Masyarakat Hutan: Buku Panduan untuk Pemerintah Daerah*, Bogor: Cifor.
- Anggraini, Rinda Ayun., Luthfi Muta'ali. 2013. Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011, *Jurnal Bumi Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, 233-242.
- Asang, H. Sulaiman. 2012. *Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas Perspektif Organisasi Publik*. Brilian Internasional, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 2012. Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka, Sosial dan Kependudukan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 2013. Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka, Sosial dan Kependudukan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 2014. Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka, Sosial dan Kependudukan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 2015. Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka, Sosial dan Kependudukan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 2016. Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka, Sosial dan Kependudukan.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2012. Data: Data Keuangan Daerah, Setelah TA 2006.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2013. Data: Data Keuangan Daerah, Setelah TA 2006.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2014. Data: Data Keuangan Daerah, Setelah TA 2006.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2015. Data: Data Keuangan Daerah, Setelah TA 2006.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2016. Data: Data Keuangan Daerah, Setelah TA 2006.
- Dr.H.SulaimanAsang,M.S,2012.*Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas,Perspektif Organisasi Publik*,Cetakan pertama,Surabaya, Brilian Internasional.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, Muhammad Zilal; Risqiani, Renny; Sofilda, Eleonora. 2012. Human development quality and its problems in indonesia. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, Vol. 5, No. 7, pp. 29-36.



- Hou, J., Walsh, P. P., dan Zhang, J. 2015. *The Dynamics of Human Development Index*. The Social Science Journal. 52: 331-347.
- Locatelli, B., Kanninen, M., Brockhaus, M., Colfer, C. J., Murdiyarso, D., & Santosa, H., 2009, *Menghadapi Masa Depan Yang Tak Pasti: Bagaimana Hutan dan Manusia Beradaptasi terhadap Perubahan Iklim*, Bogor: Cifor.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Musgrave, Richard A Musgrave, Peggy B. *Public Finance in Theory and Practise*. 1989 Mc Graw Hill Book Company
- Myrdal, Gunnar. 2000. *Obyektivitas Penelitian Sosial*, Jakarta: LP3ES.
- Novianto Dwi Wibowo. 2003. *Masalah Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Hipotesis Kuznet*. Buletin Pangsa. Edisi 10/IX.
- Sadono, Sukirno. 2000. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiarto, A. 2013. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan dan Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol. 1, Nomor No. 4, Agustus 2013.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sukmaraga, 2011, "Analisis pengaruh IPM, PDRB perkapita dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di propinsi Jawa Tengah padatahun 2008", Thesis
- Suliswanto, Muhammad Sri W. 2010. *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 8 No. 2. Desember 2010.
- Suryawati, Chriswardani. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Semarang; Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.
- S. Zul Putra. 2017. *Analisis Belanja Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Luwu*. Jurnal Riset Edisi XIV. Vol. 3, Nomor 003, Maret 2013.
- Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- United Nations Development Programme, <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN>. Diakses pada 20 November 2017.
- Wahid A, Bilal. 2012. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar periode 1996-2011*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.

- Widodo, A., Waridin, dan K., Johanna Maria. 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. Vol. 1, Nomor 1, Juli 2011.



## LAMPIRAN

**Lampiran 1: Data Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan, dan Sektor Infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2016**

Tahun	Kabupaten/Kota	Sektor Kesehatan	Sektor Pendidikan	Sektor Infrastruktur
2012	Kab. Banggai Kepulauan	44439740283	192422221145	87063748609
2013	Kab. Banggai Kepulauan	52586780554	199440944181	92596748900
2014	Kab. Banggai Kepulauan	37121430700	128994020020	67491899340
2015	Kab. Banggai Kepulauan	46548930000	145768940040	84573845900
2016	Kab. Banggai Kepulauan	94449732960	174197178500	142465116100
2012	Kab. Banggai	75442372306	287853871526	67004356948
2013	Kab. Banggai	93362550891	374798926157	139681344882
2014	Kab. Banggai	111499625761	429546735953	164520277035
2015	Kab. Banggai	137564950000	518474930400	183957305005
2016	Kab. Banggai	152555631474	529683375288	216867439402
2012	Kab. Morowali	79546012856	229169761897	115174895531
2013	Kab. Morowali	103605431810	286698404197	97251429441
2014	Kab. Morowali	45575526821	165024961927	65119428186
2015	Kab. Morowali	69563282566	179207411176	128821238774
2016	Kab. Morowali	143061378820	183328705739	244795846796
2012	Kab. Poso	64899771260	309402841883	64177613407
2013	Kab. Poso	74818325778	292701382171	94360888215
2014	Kab. Poso	75621446755	358316557505	109230655509
2015	Kab. Poso	107214484562	378715484975	113655090616
2016	Kab. Poso	172219692770	370919555301	296524962982
2012	Kab. Donggala	48935906419	281470368978	66271728673
2013	Kab. Donggala	59523659883	316057174303	110896075591

Tahun	Kabupaten/Kota	Sektor Kesehatan	Sektor Pendidikan	Sektor Infrastruktur
2014	Kab. Donggala	80681273000	334230389000	81309719000
2015	Kab. Donggala	94180350300	363932574590	75838481117
2016	Kab. Donggala	172781897271	339351147135	149993725803
2012	Kab. Tolitoli	62373203268	184850630170	54276140163
2013	Kab. Tolitoli	70000216822	192735223249	79142714776
2014	Kab. Tolitoli	83785347689	215011265428	93065105385
2015	Kab. Tolitoli	95747352000	225648763000	125647396700
2016	Kab. Tolitoli	136744795290	235701479271	142944918808
2012	Kab. Buol	48227760778	175307798156	80962256043
2013	Kab. Buol	53180655349	181993352169	66027578943
2014	Kab. Buol	61766971075	200566658196	75548923308
2015	Kab. Buol	72801638710	222956175033	84779996502
2016	Kab. Buol	164503525702	254664896366	174096360972
2012	Kab. Parigi Moutong	66152785928	232396368069	75228763836
2013	Kab. Parigi Moutong	84535229438	208000269685	85805155959
2014	Kab. Parigi Moutong	123985679105	331149322534	87664391586
2015	Kab. Parigi Moutong	162696029201	364424023876	105375979117
2016	Kab. Parigi Moutong	230961173254	401614017326	141411672234
2012	Kab. Tojo Una Una	51098592616	166852706662	64664725368
2013	Kab. Tojo Una Una	64095906748	183585606091	51161696523
2014	Kab. Tojo Una Una	83974993317	210563981757	60213878174
2015	Kab. Tojo Una Una	102597482970	223246622650	70719122451
2016	Kab. Tojo Una Una	194464878764	252623780045	118076127248
2012	Kab. Sigi	44272767000	230434855000	43464390000
2013	Kab. Sigi	48552387600	256534841200	53699724545
2014	Kab. Sigi	55570698600	266134217424	70151651245
2015	Kab. Sigi	64808763784	306070662552	79102595297

Tahun	Kabupaten/Kota	Sektor Kesehatan	Sektor Pendidikan	Sektor Infrastruktur
2016	Kab. Sigi	170243128734	359826284939	114239155882
2012	Kota Palu	112120196581	348282372209	44280234332
2013	Kota Palu	228967698413	426903657512	67311300966
2014	Kota Palu	178179337897	441784425460	90210862538
2015	Kota Palu	200058431556	488357971606	96481624664
2016	Kota Palu	328243940250	486411387154	163962615495



**Lampiran 2: Data IPM dan Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi  
Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2016**

TAHUN	Kabupaten/Kota	PERSENTASE KEMISKINAN	IPM (Y)
2012	Banggai Kepulauan	30.1	61.09
2013	Banggai Kepulauan	29.4	61.74
2014	Banggai Kepulauan	28.24	62.33
2015	Banggai Kepulauan	18.57	62.97
2016	Banggai Kepulauan	18.72	63.45
2012	Banggai	35.3	65.44
2013	Banggai	33.8	66.39
2014	Banggai	32.45	67.11
2015	Banggai	34.74	67.44
2016	Banggai	33.97	68.17
2012	Morowali	37.7	66.48
2013	Morowali	35.4	66.86
2014	Morowali	34.04	67.91
2015	Morowali	17.79	69.12
2016	Morowali	17.36	69.69
2012	Poso	40.8	66.2
2013	Poso	41.3	66.94
2014	Poso	39.65	67.65
2015	Poso	42.64	68.13
2016	Poso	42.23	68.83
2012	Donggala	48.4	61.33
2013	Donggala	49.6	63.38
2014	Donggala	47.56	63.55
2015	Donggala	54.17	63.82
2016	Donggala	55.69	64.42
2012	Tolitoli	30.7	60.05
2013	Tolitoli	30.7	61.44
2014	Tolitoli	29.46	61.91
2015	Tolitoli	30.7	62.72
2016	Tolitoli	30.68	63.27
2012	Buol	22.3	63.98
2013	Buol	21.6	64.5
2014	Buol	20.82	65.41
2015	Buol	24.31	65.61
2016	Buol	25.27	66.37
2012	Parigi Moutong	75	61.13
2013	Parigi Moutong	75.5	61.98



TAHUN	Kabupaten/Kota	PERSENTASE KEMISKINAN	IPM (Y)
2014	Parigi Moutong	74.96	62.2
2015	Parigi Moutong	82.61	62.79
2016	Parigi Moutong	82.38	63.6
2012	Tojo Una-una	29.9	59.55
2013	Tojo Una-una	29.7	60.32
2014	Tojo Una-una	27.73	61.15
2015	Tojo Una-una	27.62	61.33
2016	Tojo Una-una	27.62	62.27
2012	Sigi	29.2	62.88
2013	Sigi	27.6	64.1
2014	Sigi	26.49	64.64
2015	Sigi	29.14	65.35
2016	Sigi	29.55	65.95
2012	Kota Palu	30.1	78.36
2013	Kota Palu	25.9	78.65
2014	Kota Palu	25.66	79.12
2015	Kota Palu	27.19	79.63
2016	Kota Palu	26.24	79.73